

BAB II

PROGRAM *BISA DÈWÈK* DAN MUNCULNYA IDENTITAS SEBAGAI PETANI IPPHTI

Bab ini menguraikan proses terbentuknya identitas kolektif petani pemulia tanaman di Kabupaten Indramayu sebagai petani IPPHTI. Proses terbentuknya identitas dan jatidiri para petani tersebut terjadi dalam rangkaian peristiwa selama berlangsungnya program *Bisa Dèwèk*. Pada awal digagasnya program, yaitu ketika kerja sama antara petani dengan pihak akademisi dari Universitas Indonesia dimulai, para petani tersebut merepresentasikan diri mereka sebagai ‘kelompok petani pemulia tanaman’, mengacu pada aktivitas yang mereka lakukan selama ini. Pada perkembangan selanjutnya, identitas sebagai petani pemulia tanaman berakhir dengan terjadinya proses pembentukan identitas jatidiri mereka sebagai petani IPPHTI. Pada perkembangannya, sebutan sebagai petani IPPHTI menjadi representasi diri mereka saat berhadapan dengan *the others*. Hal ini sejalan dengan pengertian identitas sebagai sesuatu yang 'diproduksi', tidak pernah selesai dan selalu dalam proses (Hall, 1990 dalam Woodward, 2004).

Bagi petani, program *Bisa Dèwèk* sendiri bertujuan untuk memperoleh pengakuan serta dukungan pemerintah setempat atas kegiatan dan kreativitas petani dalam pemuliaan tanaman, sedangkan bagi akademisi yang menggagas, program ini bertujuan untuk merekam perubahan kebudayaan bercocok tanam yang terjadi di kalangan petani pemulia tanaman. Dalam proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan tersebut petani berhadapan dengan berbagai pihak sebagai *the others*, seperti pemerintah dan Yayasan FIELD Indonesia, yang berbeda pendapat dengan petani dan membuat para petani tersebut melakukan refleksi tentang siapa diri mereka. Untuk menjelaskan hal ini, Marcus (1998) mengatakan bahwa: “*Local identity emerges as a compromise between a mix of elements of resistance to incorporation into a larger whole and of elements of accomodation to this larger order*”. Di sisi lain, munculnya kesadaran identitas diri sebagai petani IPPHTI tersebut bukanlah sesuatu yang

direncanakan dari awal peng gagasan program *Bisa Dèwèk*. Identitas sebagai petani IPPHTI muncul sebagai konsekuensi dari aktivitas mereka berstrategi dalam usahanya memperoleh pengakuan serta dukungan dari pemerintah atas aktivitas pemuliaan tanaman yang mereka lakukan. Boudon (1982) menggunakan istilah '*perverse effect*' untuk menunjukkan adanya akibat lain dari suatu tindakan yang tidak diniatkan dari awal oleh si aktor. Menurutnya '*perverse effect*' adalah: "*Individual and collective effect that result from the juxtaposition of individual behaviours and yet were not included in the actors' explicit objectives.*"

Bab ini akan memperlihatkan proses terbentuknya kesadaran mengenai identitas/jatidiri yang muncul sebagai konsekuensi tindakan, bukan sebagai tujuan utama para aktor yang terlibat. Bab ini berusaha menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program *Bisa Dèwèk*, yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pengakuan dan dukungan pemerintah atas aktivitas pemuliaan tanaman, memunculkan kesadaran identitas diri petani sebagai petani IPPHTI. Fenomena tersebut berlangsung melalui sebuah proses yang berlangsung di kelompok-kelompok basis IPPHTI Kabupaten Indramayu.

Kabupaten Indramayu dan Kondisi Pertanian Masyarakatnya

Kabupaten Indramayu merupakan daerah tingkat dua yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Letak wilayah Kabupaten Indramayu berada di jalur pantai utara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jalur Pantura. Jarak Indramayu dari Jakarta adalah sekitar 200 km ke arah timur dan dapat ditempuh dengan kendaraan darat dengan lama tempuh sekitar dua setengah jam. Untuk menuju Indramayu dari Jakarta juga dapat digunakan sarana transportasi kereta api. Stasiun Jatibarang merupakan stasiun kereta api terbesar di Kabupaten Indramayu dan menjadi tempat perhentian utama jika ingin menuju Kota Indramayu. Sementara dari Bandung, jarak tempuh menuju Kabupaten Indramayu adalah sekitar 183 km ke arah tenggara dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan umum (akses darat) dengan lama perjalanan sekitar lima jam. Waktu tempuh yang relatif lebih lama dari Bandung dibandingkan

yaitu seluas 204.011 ha, lebih dari separuhnya yaitu 110.877 ha adalah areal persawahan (lihat tabel 01). Kondisi ini menyebabkan aktivitas pertanian, khususnya pertanian tanaman padi di Indramayu mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Internasional (NGOs), Universitas, maupun pihak lainnya yang merasa berkepentingan.

Tabel 01. Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Indramayu. (Sumber: *Profil Pembangunan Pertanian Kab. Indramayu, 2008*)

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
1.	Sawah	110.877	54,35
2.	Pekarangan	25.283	12,39
3.	Kebun/Tegalan	6.240	3,06
4.	Lain-Lain	61.611	30,20
JUMLAH		204.011	100

Sementara itu dalam film *Bisa Dèwèk*, petani Indramayu mengemukakan bahwa luas lahan persawahan di Kabupaten Indramayu adalah 118.000 ha. Ini berarti terdapat selisih kurang lebih 8.000 ha antara jumlah lahan yang berada dalam data statistik pemerintah (2008) dengan luas yang diperkirakan oleh petani. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah kemungkinan bahwa petani dalam film *Bisa Dèwèk* (H. Masroni) memakai perhitungan luas lahan yang pernah diketahuinya beberapa waktu yang telah lampau sehingga sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ada kemungkinan bahwa luas sawah itu mengalami pengurangan dari waktu ke waktu karena berubah fungsi. Dalam film *Bisa Dèwèk* H. Masroni mengaitkan antara luas lahan persawahan di Kabupaten Indramayu dengan tingkat kebutuhan benih yang digunakan oleh petani (lihat tabel 02).

Tabel 02. Luas areal persawahan Kabupaten Indramayu menurut petani dan perhitungan kebutuhan benih, serta pengeluaran petani untuk kebutuhan benih setiap tahunnya (Sumber: Film *Bisa Dèwèk*)

Luas areal persawahan	: 118.000 ha.
Kebutuhan benih per ha	: 20 kg
Total kebutuhan benih per musim:	2.360.000 kg
Per tahun	: 4.720.000 kg
Jadi,	
Belanja benih per musim yang dikeluarkan petani	: Rp. 14.160.000.000
Belanja benih per musim yang dikeluarkan petani	: Rp. 28.320.000.000

Kondisi lahan dan ketersediaan sarana pertanian menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan produksi pertanian. Di Kabupaten Indramayu, terdapat variasi kondisi lahan pertanian (sawah) berdasarkan bentang alam serta ketersediaan sarana irigasi atau pengairan. Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Indramayu merupakan lahan yang mendapatkan pengairan. Menurut data dari Dinas Pertanian setempat, lahan (sawah) dengan pengairan teknis menempati jumlah terbanyak dari keseluruhan lahan yang ada yaitu seluas 72.114 ha. Kemudian lahan setengah teknis seluas 11.868 ha, lahan tadah hujan seluas 18.817, serta lahan dengan irigasi pedesaan seluas 8.078 ha (lihat tabel 03). Kondisi ini berpengaruh terhadap pola tanam petani di Kabupaten Indramayu yakni adanya variasi jumlah masa tanam dan komoditas yang ditanam. Untuk wilayah dengan lahan beririgasi teknis misalnya, masa tanam dapat dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun sehingga petani dapat memperoleh hasil panen tiga kali dalam setahun. Contohnya adalah lahan di Kecamatan Tukdana. Untuk lahan dengan kondisi pengairan setengah teknis masa tanam dapat dilakukan dua kali dalam setahun. Sedangkan lahan tadah hujan hanya dapat ditanami sekali dalam setahun karena pengairannya hanya mengandalkan curah hujan yang terdapat misalnya di Kecamatan Gabuswetan dan Kecamatan Kroya.

Sementara itu sumber utama irigasi wilayah Kabupaten Indramayu yaitu dari Bendungan Jati Luhur dan Bendungan Rentang.

Tabel 03. Kondisi Pengairan Lahan Pertanian di Kabupaten Indramayu (Sumber: *Profil Pembangunan Pertanian Kab. Indramayu, 2008*)

Teknis	:	72.114	Ha
Setengah Teknis	:	11.868	Ha
Tadah Hujan	:	18.817	Ha
Irigasi Pedesaan	:	8.078	Ha
Total		110.877	Ha

Sementara itu dilihat dari status kepemilikan lahan pertanian di Kabupaten Indramayu (lihat tabel 04), mayoritas petani merupakan buruh tani dan petani penggarap yang masing-masing menempati persentase 44, 62 % dan 17,32 % dari total petani. Diikuti oleh jumlah petani pemilik-penggarap yaitu 21 %, lalu petani pemilik sebanyak 16.52 persen.

Tabel 04. Status Kepemilikan Lahan Pertanian di Kabupaten Indramayu (Sumber: *Profil Pembangunan Pertanian Kab. Indramayu, 2008*)

No	Kepemilikan lahan	Jumlah	(%)
1.	Pemilik	110.626	16.52
2.	Pemilik - Penggarap	144.231	21.54
3.	Penggarap	115.977	17.32
4.	Buruh Tani	298.831	44.62
	Total	669.665	100

Kenyataan Indramayu sebagai “Lumbung Padi Nasional” telah berakibat secara langsung pada aktivitas pertanian yang melibatkan campur tangan pihak lain dalam program-program yang dijalankan pada petani. Sebut saja misalnya program Revolusi Hijau (RH) yang dijalankan oleh pemerintah sejak awal dasawarsa 70-an. Pemikiran

pembangunan pertanian pada awal tahun 1960 dan 1970 sangat dipengaruhi oleh permasalahan tentang bagaimana memberi makan populasi dunia yang semakin meningkat secara tajam. Kemudian, solusi secara langsung yang terpikirkan adalah dengan meningkatkan per kapita produksi makanan (Conway dan Barbier, 1990). Tujuan untuk meningkatkan per kapita pendapatan yang disesuaikan dengan peningkatan per kapita produksi makanan, sebagai tujuan dari Revolusi Hijau, dikampanyekan secara luas oleh komunitas donor internasional dan diarsiteki oleh *International Agricultural Research Centres* (IARCs). Menurut Conway dan Barber (1990), pada intinya program Revolusi Hijau terfokus pada tiga aktivitas yang saling berkaitan yaitu:

1. Program pembenihan (*Breeding Programs*) untuk bahan baku padi-padian (*cereals*) dengan kemampuan menghasilkan yang cepat (produksi), tahan gangguan (*day-length insensitive*) dan varietas dengan produksi tinggi (*high-yielding varieties/HYVs*).
2. Pengorganisasian dan pendistribusian paket-paket yang diharapkan akan memberikan input yang besar (*high pay-off inputs*) seperti pupuk, pestisida, dan regulasi air.
3. Pengimplementasian segala macam *technical innovation* ini di daerah yang dianggap cocok dari segi *agroclimatic* dan untuk petani-petani dengan kemungkinan yang terbesar untuk dapat merealisasikan pertanian yang potensial.

Sejarah pertanian mencatat bahwa dampak yang ditimbulkan dari program Revolusi Hijau sangat besar berpengaruh bagi dunia ketiga terutama pada produksi gandum dan padi. Antara sepertiga sampai separuh daerah padi di nagara-negara berkembang telah ditanami dengan bibit unggul (*high-yielding varieties*) (lihat Conway dan Barbier, 1990).

Di Indramayu, program Revolusi Hijau ditandai dengan diperkenalkannya benih unggul yang menggantikan benih lokal. Benih unggul (*high-yielding varieties*) yang diperkenalkan oleh pemerintah mempunyai ciri-ciri produktivitas tinggi, respon terhadap pupuk kimia dan pestisida, umur pendek yang menggantikan benih lokal

yang berumur panjang, sehingga masa panen semakin cepat. Hasil yang impresif dari program Revolusi Hijau pada kenyatannya juga diikuti dengan dampak negatif. Sebagai contoh dari penggunaan benih unggul sebagai “benih tunggal” (*monocropping*) yang mempunyai ciri-ciri *genotipe* yang seragam telah mengakibatkan peningkatan insiden serangan hama, penyakit, dan gulma, kadang-kadang disertai efek buruk dari penggunaan pestisida. Selain itu, benih modern membutuhkan penggunaan pupuk yang banyak. Petani mengalami penambahan pengeluaran yang harus dibayarkan untuk membeli pupuk jika ingin memperoleh hasil panen yang maksimal. *Euforia* Revolusi Hijau mendapat tantangan dari banyaknya kritik tajam yang ditujukan pada program ini. Sejak tahun 1960-an dan 1970-an kemajuan di bidang teknologi pertanian telah menimbulkan degradasi lingkungan dan menciptakan keraguan tentang keuntungan dari penggunaan teknologi (Ruttan, dalam Bentley dkk., 2005).

Kesadaran tentang pertanian yang berkelanjutan telah membawa perubahan terhadap praktik pertanian yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan efisiensi penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang sebelumnya digunakan dalam jumlah besar. Pada awal bulan November 1986 pemerintah mengeluarkan INPRES No.3 tahun 1986 sebagai suatu kebijakan nasional terkait perlindungan tanaman pangan, yang memuat beberapa peraturan antara lain: 1) penggunaan insektisida dilakukan apabila cara pengendalian hama yang lain tidak efektif, yaitu apabila populasi hama diatas ambang ekonomi; 2) jenis dan cara aplikasi insektisida harus memperhatikan kelestarian musuh alami hama; dan 3) jenis insektisida yang dapat menimbulkan resurgensi, resistensi, atau dampak lain yang merugikan dilarang digunakan untuk tanaman padi. Akhirnya INPRES tersebut melarang penggunaan 57 jenis pestisida merk terdaftar berspektrum luas untuk tanaman padi. INPRES No.3 tahun 1986 ini merupakan terobosan yang menunjang sekaligus mencanangkan pengembangan dan penerapan program pengendalian hama terpadu (Buku Informasi PN PHT, tanpa tahun). Program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) atau yang dikenal dengan sebutan *Integrated Pest Management* (IPM) merupakan sebuah program nasional yang diluncurkan pada tahun 1989. Aktivitas utama dari program PHT adalah sekolah

lapang atau *Farmers Fields School* (FFS). Pada dasarnya program ini bertujuan untuk menjalankan praktik pertanian sehat, pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia, pelestarian dan pendayagunaan fungsi musuh alami tanaman, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani atas aktivitas pertanian sebagai pelaku utama yang dilibatkan dalam PHT (Buku Informasi PN PHT, tanpa tahun).

Gelombang pertama pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dilakukan pada tahun 1989. Kegiatan ini melibatkan 200 kelompok sekolah lapang (*farmers fields schools*) di empat kecamatan di Provinsi Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu Indonesia atas dana dari *The Government of Indonesia –United States Agency for International Development* (GOI-USAID) dan melibatkan asisten teknik dari FAO. Sampai tahun 1990, Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu Indonesia telah meluncurkan 1.800 buah FFS di enam Provinsi di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan (CIP-UPWARD, 2003:5). Pelaksanaan PHT di Indonesia adalah sebuah *pilot project* yang menjadi percontohan bagi pelaksanaan program sejenis di negara-negara lain. Baru pada tahun 1991 program serupa diterapkan dan dilaksanakan di negara-negara lain seperti Filipina, Srilanka, Bangladesh, Cina, India, Laos, dan Vietnam (CIP-UPWARD, 2003:5).

Pada pertengahan tahun 1995 di Kabupaten Indramayu, khususnya di Desa Kalensari dilaksanakan *Action Research Facilities* (ARF) atau yang lebih dikenal dengan Aksi Riset Fasilitasi. Menurut laporan yang diterbitkan oleh tim bantuan teknis FAO (1996) ARF bertujuan untuk memfasilitasi petani setempat agar melakukan transformasi sosial sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah lokal yang mereka hadapi melalui proses “melakukan dan menyebarkan studi secara partisipatoris” dan proses tersebut menganut prinsip “dari petani, oleh petani, dan untuk petani” (bantuan teknis FAO, 1996).

Pada tahun 2002 petani Indramayu kembali mendapatkan inisiasi program yang terlaksana atas bantuan pihak donor. Pada tahun 2002 Yayasan FIELD Indonesia (*Farmer Initiatives for Ecological Livelihood Democracy*) menginisiasi sebuah program yang sama sekali baru untuk diperkenalkan pada petani di

Indramayu. Program ini bernama PEDIGREA (*Participatory Enhancement of Diversity of Genetic Resources in Asia*). Dalam program ini petani diperkenalkan teknik menyilangkan tanaman atau yang lebih umum dikenal dengan sebutan pemuliaan tanaman. Tujuan utama program ini selain memperkenalkan cara pemuliaan tanaman lebih lanjut adalah agar petani mempunyai kemandirian dalam hal pengadaan benih (padi dan sayuran). Kehadiran FIELD dengan program PEDIGREA yang memfokuskan pada pengenalan cara pemuliaan tanaman telah membawa dinamika tersendiri bagi kehidupan petani Indramayu. Tidak semua peserta pelatihan dapat mempraktikkan ilmu yang mereka dapatkan. Banyak alasan yang melatarbelakangi hal ini. Kegiatan menyilangkan benih membutuhkan ketekunan dan keterampilan yang tinggi. Namun demikian alumni-alumni dari Sekolah Lapang Pemuliaan Tanaman (SLPT) telah tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Indramayu yang menunjukkan bahwa petani ternyata mampu menguasai praktik yang sebelumnya hanya didominasi oleh kalangan ilmuwan pertanian.

Sejarah Singkat IPPHTI Kabupaten Indramayu

Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Kabupaten Indramayu merupakan bagian dari sebuah jaringan organisasi IPPHTI Nasional. IPPHTI Nasional merupakan organisasi yang berbentuk jaringan yang mempunyai kelompok-kelompok basis di tingkat kabupaten yang tersebar di tiga belas kabupaten di seluruh Indonesia. Tiap kabupaten mempunyai jejaring berupa kelompok basis di tingkat kecamatan (lihat gambar 02). Dalam anggaran dasarnya (lihat AD/ART IPPHTI Nasional Th.2008), IPPHTI Nasional menyatakan bahwa IPPHTI merupakan organisasi jaringan petani PHT, yaitu petani yang melakukan budi daya tanaman secara ekologis serta menjunjung tinggi pemberdayaan petani dan keseimbangan lingkungan. Organisasi ini dibentuk melalui Musyawarah Petani PHT Indonesia pada tanggal 16 s/d 21 Juli 1999 di Kecamatan Moyudan Kab. Sleman Yogyakarta dan dihadiri oleh 461 orang Petani PHT yang merupakan perwakilan kelompok tani alumni SLPHT (Sekolah Lapangan Pengendalian Hama terpadu) dari 11 propinsi

yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.



Gambar 02. Lambang IPPHTI Kabupaten Indramayu

Penjelasan Lambang :

1. Jaring laba-laba melambangkan jaringan yang saling menguatkan antara satu simpul (Kelompok) dengan simpul (Kelompok) yang lain, jaring laba-laba kuat karena ada saling menguatkan diantara satu simpul dengan simpul yang lain dan pada jaring laba-laba tidak ada yang menguasai/mendominasi (Prinsip kesamaan hak dan kesempatan, kerjasama, tidak ada atasan dan bawahan, saling menguatkan diantara satu dengan yang lainnya) berkat jaring yang saling menguatkan walaupun kelihatan lembek/rapuh tapi pada kenyataannya dapat menangkap hama yang bisa merusak tanaman disawah.
2. Bulatan hitam pada jaring jaring laba-laba melambangkan simpul-simpul/kelompok-kelompok yang akan menguatkan satu dengan yang lainnya.
3. Gambar pulau-pulau melambangkan adanya jaringan dipulau Jawa, Sumatera, Bali, NTB, dan menyusul Kalimantan.
4. Tulisan "IPPHTI Indramayu" adalah nama jaringan IPPHTI Kabupaten Indramayu.

(Sumber: AD/ART IPPHTI Kabupaten Indramayu, 2008)

Pada tahun 1992, Kabupaten Indramayu menjadi salah satu daerah sasaran program Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) yang merupakan sebuah program nasional. Di Indramayu sendiri, kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten

Universitas Indonesia

Indramayu. Kegiatan ini untuk pertama kalinya diadakan di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra. Kelanjutan dari kegiatan ini adalah diadakannya TOT (*Training of Trainers*) pada tahun 1995 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu yang bertujuan untuk mempersiapkan pelatih yang mengisi pelatihan PHT untuk daerah-daerah lainnya di Kabupaten Indramayu. Peserta TOT ini adalah para alumnus SLPHT generasi pertama. Pada tahun 1997, para alumni SLPHT membentuk sebuah wadah atau paguyuban yang mereka sebut IPASI (Ikatan Petani Alumnus SLPHT Indonesia). Pembentukan IPASI ini dilakukan di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu (H.Masroni, komunikasi pribadi 2007).

Dalam perjalanan selanjutnya, bertepatan dengan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten yang pertama, timbul gagasan untuk merubah IPASI menjadi IPPHTI (Ikatan Petani Penguendalian Hama Terpadu Indonesia) Kabupaten Indramayu, setelah terbentuknya IPPHTI Nasional tahun 1999. Perubahan ini disepakati dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab I) yang bertempat di Kecamatan Cikedung pada tanggal 14 Maret 2000 (H. Masroni, komunikasi pribadi, 2007)

Kegiatan yang pernah diikuti oleh IPPHTI Kabupaten Indramayu selama kurun waktu sampai tahun 2002 di dalam dan luar Indramayu, antara lain (berdasarkan sumber dokumen IPPHTI Kabupaten Indramayu):

1. Pelatihan sains dan kepemimpinan di di Desa Kurung Kambing Kecamatan Ciparai Kabupaten Pandegelang, Jawa Barat
2. Musawarah Daerah (Musda) IPPHTI Jawa Barat
3. TOT Benih di Kabupaten Sukabumi, SLPT di Desa Nunuk, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu.
4. TOT SRI (*System of Rice Intensification*) di Jakarta
5. Studi SRI di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Indramayu.
6. *Workshop* SRI tingkat nasional di Wonosari Tengah, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
7. Pameran SRI dan Benih tingkat nasional di Yogyakarta.

8. Mengikuti seminar Kedaulatan Pangan di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
9. TOT Pemuliaan Sayuran Lokal di Desa Nunuk, Kecamatan Lelea, Indramayu.
10. Menerima kunjungan tamu dari petani Mesir (lihat Sejarah IPPHTI Kabupaten Indramayu, 2007)

Kegiatan-kegiatan yang disebutkan diatas merupakan kegiatan yang pernah diikuti oleh IPPHTI Kabupaten Indramayu berdasarkan data yang saya peroleh dari sumber dokumen IPPHTI Kabupaten Indramayu. Tidak jelas benar mana kegiatan yang menempatkan IPPHTI Kabupaten Indramayu sebagai penyelenggara kegiatan dan mana kegiatan yang hanya menempatkan petani-petani IPPHTI Kabupaten Indramayu sebagai peserta, yang dalam hal ini berarti IPPHTI hanya mengirimkan utusannya dalam kegiatan tersebut. Menurut analisis yang saya lakukan, aktivitas-aktivitas yang disebutkan diatas mencakup tiga kategori dari karakteristik pelaksanaan kegiatan yaitu 1) kegiatan yang dilaksanakan atas kerja sama IPPHTI Kabupaten Indramayu dengan pihak lain; 2) kegiatan yang hanya menempatkan petani IPPHTI Kabupaten Indramayu sebagai peserta; dan 3) kegiatan yang dilakukan oleh IPPHTI Kabupaten Indramayu atas inisiatif mereka. Beberapa kegiatan dapat langsung diasumsikan hanya menempatkan petani IPPHTI Kabupaten Indramayu sebagai peserta yang mengirimkan utusannya pada acara tersebut. Ini terjadi sebagai contoh pada kegiatan pelatihan sains dan kepelembagaan yang kegiatannya diselenggarakan di Kabupaten Pandeglang (saat ini masuk wilayah Provinsi Banten). Dalam kegiatan ini tentu IPPHTI Kabupaten Indramayu hanya mengirimkan perwakilan petaninya sebagai peserta pelatihan karena kegiatan ini tidak digagas oleh IPPHTI Kabupaten Indramayu, dan juga bukan program yang terselenggara atas kerja sama antara IPPHTI Kabupaten Indramayu dengan lembaga lain. Begitu juga dengan kegiatan *Workshop* SRI tingkat nasional di Wonosari Tengah, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Seminar Kedaulatan Pangan di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Sementara itu program yang berlangsung atas kerja sama antara IPPHTI Kabupaten Indramayu dengan pihak lain terlihat dari kegiatan pemuliaan tanaman (baik sayuran maupun padi), yang digagas atas kerja sama antara IPPHTI Kabupaten Indramayu dengan Yayasan FIELD Indonesia secara kelembagaan. Dalam program ini terdapat petani-petani IPPHTI Kabupaten Indramayu yang dijadikan pemandu sebagai hasil dari TOT *Training of Trainers*. Walaupun pada perjalanan program selanjutnya peran IPPHTI menjadi kabur dan tidak terlihat (akan dijelaskan pada sub bab berikutnya).

Program yang digagas dan dijalankan oleh IPPHTI Kabupaten Indramayu menurut penilaian saya tidak terdapat dalam daftar kegiatan yang disebutkan diatas. Hal ini dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa sampai dengan tahun 2002 IPPHTI Kabupaten Indramayu tidak pernah melaksanakan satu program atas inisiatif sendiri secara kelembagaan. Kegiatan-kegiatan lain yang disebutkan diatas perlu dilihat dan dicermati waktu dan konteks pelaksanaannya. Misalnya saja kegiatan menerima kunjungan tamu dari Mesir, perlu dilihat apakah kegiatan ini ada hubungannya dengan aktivitas dalam program PEDIGREA. Jika iya, berarti ini bukan murni kegiatan yang dilakukan oleh IPPHTI Kabupaten Indramayu tetapi petani-petani IPPHTI hanya dijadikan subjek studi banding bagi petani Mesir misalnya. Kegiatan yang murni dilakukan oleh IPPHTI Kabupaten Indramayu saya kira ada dalam kegiatan studi SRI di Desa Sumuradem, Indramayu. Hal ini karena petani-petani IPPHTI Kabupaten Indramayu diasumsikan telah memiliki pengetahuan tentang praktik tanam SRI yang dibuktikan dengan kenyataan bahwa sebelumnya terdapat petani-petani IPPHTI Kabupaten Indramayu yang ikut serta dalam kegiatan TOT SRI di Jakarta.

Setelah masa kepengurusan IPPHTI yang lama berakhir, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2003 diadakan suatu Musyawarah Kabupaten yang ke-2, untuk membentuk kepengurusan yang baru. Musyawarah Kabupaten (Muskab) yang ke-2 ini diadakan di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra dan menghasilkan kepengurusan yang baru untuk periode 2002-2007.

Susunannya adalah :

Universitas Indonesia

1. Koordinator Umum : H.B Sarma
2. Koordinator I : Abbas
3. Koordinator II : Nurkilah
4. Sekretaris I : Muadib MR.
5. Sekretaris II : Asep S.
6. Bendahara : Diwang
7. Seksi-Seksi
 - a. Humas : Karjita
 - b. Kepemanduan : Didi Casmudi, Bunyamin, dan Aminudin
 - c. Advokasi : Nurjanah S.Ag
 - d. Sains : Sukenda
8. Badan Musyawarah : H. Madrisa, Warsiyah, Sirad, Karsinah, dan Wasga (lihat Sejarah IPPHTI Kabupaten Indramayu, 2007)

Kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh IPPHTI Kabupaten Indramayu dalam kurun waktu sejak dibentuknya IPPHTI Kabupaten Indramayu, yaitu tahun 2000, sampai menjelang dilaksanakannya program *Bisa Dèwèk* merupakan program yang bersifat *top down*, dalam pengertian bahwa kegiatan tersebut tidak melibatkan petani sebagai pihak yang secara aktif merencanakan, membuat dan mengatur jalannya pelaksanaan program. Hal ini diakui oleh H. Sarma, sebagai koordinator umum IPPHTI periode 2002-2007. Menurutnya, dalam program yang berlangsung misalnya program PEDIGREA yang dimulai sejak tahun 2002, IPPHTI hanya menjadi pintu masuk bagi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dalam hal ini Yayasan FIELD Indonesia sebagai syarat kerja sama agar LSM tersebut dapat menjangkau petani-petani sampai ke tingkat desa. Pada pelaksanaannya, sedikit sekali peran yang dapat dijalankan oleh IPPHTI, dan nama IPPHTI jarang disebut karena perannya makin hari makin memudar. Misalnya, dalam lokakarya petani pemulia tanaman yang melibatkan sebelas kelompok dari sebelas kecamatan, lokakarya tersebut cenderung mengatasnamakan program kegiatan dan membawa nama Yayasan FIELD sebagai

penyelenggara. Alhasil, salah seorang petani pemandu dalam program pemuliaan tanaman, pak Warsiah, yang merupakan anggota IPPHTI untuk waktu yang lama lebih dikenal sebagai “orang FIELD”, menurut pengakuan dari salah seorang petani di Kecamatan Kroya. Inilah yang menjadi latar belakang kemunduran IPPHTI Kabupaten Indramayu dan membuatnya “tertidur pulas”.

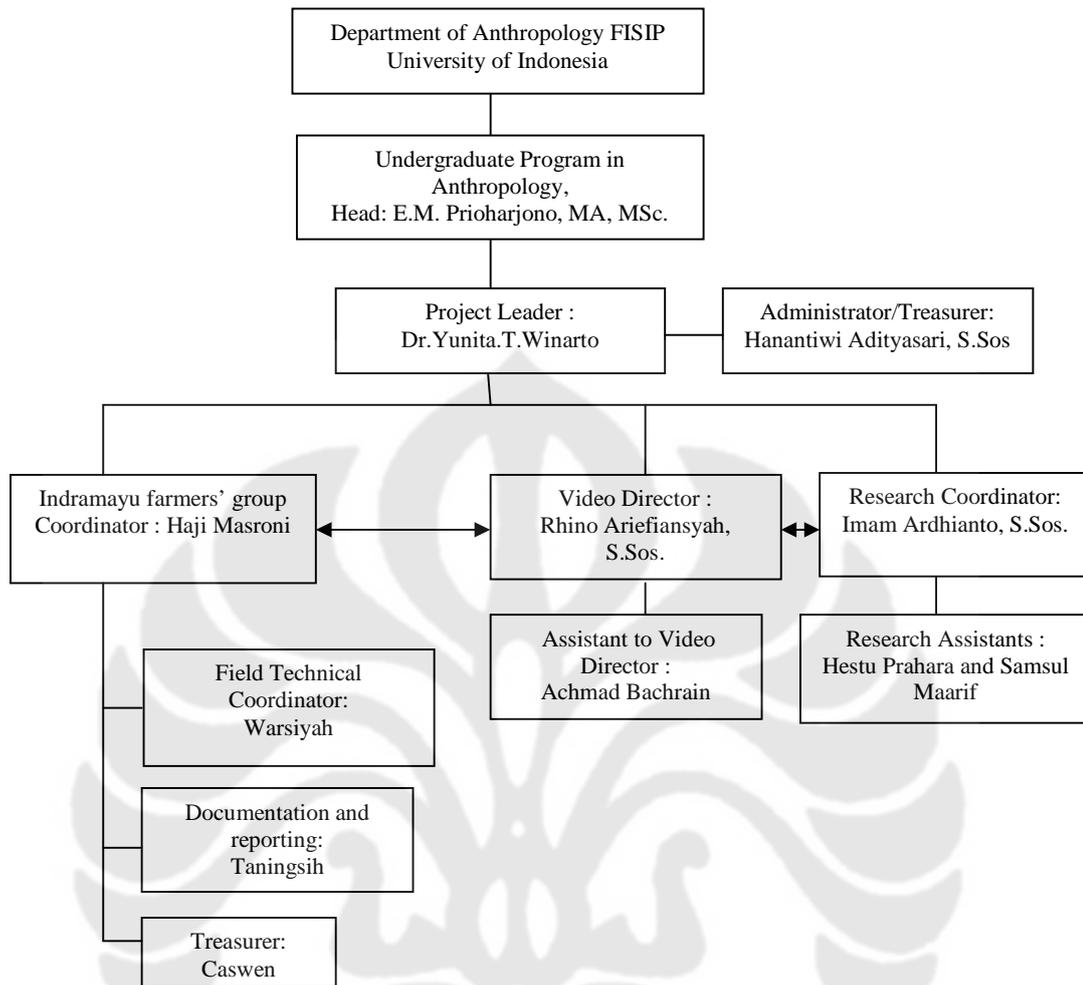
Program *Bisa Dèwèk* dan IPPHTI yang ‘Sedang Tidur’

Sejarah awal program kolaborasi antara UI dan petani dimulai ketika pada awal bulan Juni 2006 terdapat kesepakatan antara UI dan petani pemulia tanaman di Kabupaten Indramayu untuk mendokumentasikan aktivitas pemuliaan tanaman. Petani mempunyai keinginan untuk menyebarkan pengetahuan mereka mengenai praktik pemuliaan tanaman yang selama ini hanya diketahui secara terbatas di kalangan peserta SLPT (Sekolah Lapang Pemuliaan Tanaman). Selain itu, petani menghendaki adanya pengakuan serta dukungan dari pemerintah sebagai legitimasi kegiatan yang mereka lakukan. Di sisi lain, pihak UI sebagai penggagas program kerja sama mempunyai tujuan untuk merekam dan membuat suatu kajian akademis tentang perubahan kebudayaan bercocok tanam yang sedang berlangsung di kalangan petani pemulia tanaman di Kabupaten Indramayu. Kerja sama yang semula direncanakan adalah pembuatan suatu film dokumenter tentang aktivitas pemuliaan tanaman.

Ketika gagasan untuk merekam aktivitas dan kreativitas petani pemulia tanaman di Indramayu itu muncul pada kunjungan pertama Yunita T. Winarto dan Budi Baskoro, mereka dihadapkan dengan pertanyaan bagaimana mewujudkan keinginan tersebut. Hal ini terkait dengan dua permasalahan utama yakni tentang sumber pendanaan (sponsor) dan siapa yang berkompeten untuk mengerjakan proses pembuatan film dokumenter yang sedang digagas itu (Winarto, 2007). Menurut keterangan yang dikemukakan oleh Winarto (2007), proses setelah kunjungan pertama bersama Budi Baskoro tersebut merupakan proses ketika dia memikirkan kemungkinan mendapatkan sponsor untuk mendukung aktivitas yang sedang dirancang yaitu membuat video dokumentasi tentang kreativitas dan aktivitas petani

pemulia tanaman. Setelah menelusuri berbagai sumber informasi dan menjajaki beberapa peluang, akhirnya Yunita T. Winarto mendapatkan respon dari pihak Kedutaan Besar Finlandia atas surat elektronik (*email*) yang dia kirimkan sebagai permintaan untuk menjadi pihak yang akan menjadi sponsor kegiatan. Sebagai tindak lanjut dari respon pihak Kedutaan Besar Finlandia tersebut, Yunita T. Winarto diminta untuk menyerahkan proposal kegiatan guna dipertimbangkan dengan catatan bahwa dana yang akan mereka alokasikan bukan hanya diperuntukkan bagi pembuatan film, tetapi harus juga terkait dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat (Winarto, 2007). Selanjutnya permintaan atau syarat yang diajukan oleh pihak Kedutaan Besar Finlandia tersebut didiskusikan oleh tim UI dan petani pemulia tanaman Kabupaten Indramayu terkait aktivitas pemberdayaan masyarakat dengan model seperti apa yang dapat dilakukan dengan menggunakan media visual.

Dalam kesepakatan kerja sama yang dilakukan, UI langsung berhubungan dengan petani-petani yang menyebut dirinya sebagai kelompok petani pemulia tanaman. Mereka tidak merepresentasikan diri sebagai petani IPPHTI. Hal ini terungkap dari pernyataan Yunita T. Winarto (2007) bahwa dalam melakukan koordinasi dengan petani di Indramayu, dia selalu mengomunikasikannya secara langsung dengan individu petani pemulia tanaman khususnya yang berada di Desa Kalensari. Di sini mereka memberikan kesan bahwa petani pemulia tanaman merupakan satu kategori tersendiri yang berbeda dengan petani lain misalnya petani penangkar benih dan sebagainya. Bagan kepanitiaan kerja sama yang dibuat untuk menunjang program ini (lihat gambar.03) memperlihatkan bahwa dalam tahap awal digagasnya program, kerja sama antar dua lembaga (UI dan IPPHTI Kabupaten Indramayu) belum terjadi. Ini disebabkan karena memang ketika UI berhadapan dengan para petani tersebut dalam tahap awal kerja sama, mereka merepresentasikan diri sebagai petani pemulia tanaman.



Gambar 03. Bagan Struktur Manajemen, Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Program *Bisa Dèwèk* (Sumber: Proposal Program *Bisa Dèwèk*, 2006)

(Catatan: Dalam bagan diatas terlihat bahwa pada awal digagasnya kerja sama antara UI dan Petani pemulia tanaman, para petani tersebut merepresentasikan diri mereka tidak sebagai petani IPPHTI Kabupaten Indramayu. Pada tahap ini identitas mereka sebagai petani IPPHTI kabupaten Indramayu belum diaktifkan)

Diskusi awal tentang penyusunan proposal kerja sama diadakan di Depok pada tanggal 12 Agustus 2006 bertempat di gedung D3 Pariwisata Fisip Universitas Indonesia. Diskusi ini dihadiri oleh tiga orang perwakilan dari tim UI yaitu Yunita T. Winarto yang di dampingi oleh Rhino Ariefiansyah dan Imam Ardhiyanto. Sedangkan wakil dari Indramayu adalah H. Masroni dan pak Warsiah (Data Tim *Bisa Dèwèk*,

2007). Dalam diskusi ini ditekankan pada bagaimana film digunakan, dibuat dan dipromosikan. Dari hasil diskusi disepakati bahwa yang diperlukan saat ini oleh kelompok di sebelas kecamatan yang terdapat aktivitas pemuliaan tanaman adalah :

- Penguatan kelompok pemulia tanaman
- Pengetahuan seleksi benih padi
- Pendokumentasian hasil seleksi
- Pemerataan pengetahuan
- Keperluan kampanye dari pemerintah
- Pembiayaan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk berbagai kegiatan pengembangan kelompok.
- Pengakuan dari pemda melalui penguatan kelompok pemulia tanaman

Adapun tahapan penguatan yang dimaksud adalah :

- Penguatan kelompok
- Pengakuan dari Pemerintah daerah (legitimasi dari pemerintah)
- Memperluas jaringan untuk penyebaran pengetahuan. (Sumber: *Data Tim Bisa Dèwèk, 2007*)

Masing-masing pihak yang terlibat yaitu tim UI dan tim Indramayu mempunyai kepentingan yang sama meskipun dalam konteks yang berbeda terhadap film tersebut, yaitu :

- Untuk tim UI akan berguna untuk kepentingan akademis/ilmiah baik untuk kepentingan internal Universitas Indonesia dalam kegiatan pengajaran dan penelitian maupun penyebarluasan pengetahuan hasil penelitian dan dokumentasi etnografi dalam berbagai forum ilmiah di dalam dan luar negeri;
- Untuk tim Indramayu akan berguna untuk kepentingan penyebarluasan informasi oleh IPPHTI Kabupaten Indramayu tentang kegiatan petani dalam pemuliaan tanaman baik di kalangan komunitas petani maupun bagi pihak-pihak lain dalam berbagai forum di dalam dan luar negeri. (Sumber: *Data Tim Bisa Dèwèk, 2007*).

Film itu sendiri terbagi dalam dua macam bentuk yaitu satu film yang bertujuan untuk promosi kegiatan dan satu film lagi adalah film tentang teknis kepeemanduan pemuliaan tanaman.

Setelah film selesai diproduksi, tahapan kegiatan selanjutnya adalah :

- Sosialisasi film dalam lokakarya awal di sebelas kecamatan yang di hadiri oleh beberapa perwakilan kelompok dari tiap-tiap kecamatan dan juga beberapa tamu undangan
- Sosialisasi film di sebelas kecamatan
- Sosialisasi film di tingkat kabupaten dan juga seminar dan dialog dengan bupati

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing tim adalah :

- Tim UI bertindak untuk kepentingan akademis/ilmiah dan pelaporan pada pihak donor, dan Tim Indramayu untuk kepentingan pelaporan pada Tim UI dan dokumentasi IPPHTI Indramayu sendiri.
- Pelaksanaan lokakarya dan penayangan film diselenggarakan oleh Tim Indramayu sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun tim dan diserahkan pada Tim UI guna diintegrasikan dalam proposal pada pihak donor: *The Embassy of the Republic of Finland*. Tim UI bertanggung jawab dalam membantu penayangan film, sedangkan substansi lokakarya menjadi tanggung jawab Tim Indramayu. . (Sumber: *Data Tim Bisa Dèwèk*, 2007).

Untuk mencapai semua itu diperlukan strategi dan cara tertentu mengingat 'alot-nya' pengakuan pemerintahan selama ini terhadap legitimasi kegiatan pemuliaan tanaman. Dengan dibuatnya film, petani mengharapkan tujuan itu akan lebih mudah dicapai. Pada awal disepakatinya kerja sama dalam program kolaborasi ini, belum ada kesadaran di kalangan individu-individu petani pemulia tanaman di Kabupaten Indramayu bahwa mereka bertindak mewakili IPPHTI (Ikatan Petani

Pengendalian Hama Terpadu) Kabupaten Indramayu yang menaungi mereka. Padahal di antara mereka terdapat anggota bahkan pengurus IPPHTI. Mereka hanya merepresentasikan diri mereka sebagai kelompok pemulia tanaman. Ini menunjukkan bahwa identitas sebagai petani IPPHTI belum muncul atau belum diaktifkan.

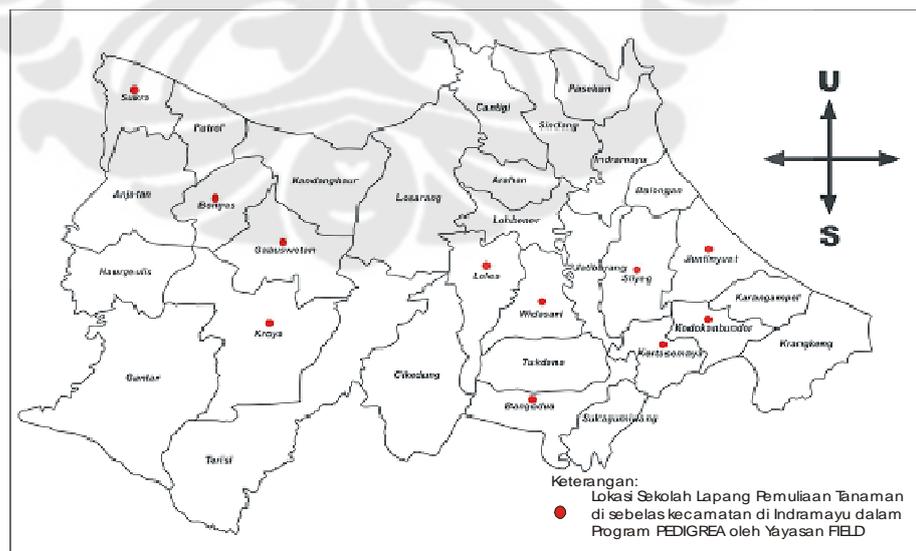
IPPHTI yang ‘Sedang Tidur’

Istilah IPPHTI yang ‘Sedang Tidur’ merujuk pada kondisi IPPHTI yang mewadahi petani-petani pemulia tanaman di Indramayu dalam kurun waktu semenjak tahun 2002 hingga pelaksanaan program *Bisa Dèwèk*. Hal ini terkait erat dengan minimnya kegiatan yang dilakukan oleh IPPHTI Kabupaten Indramayu yang melibatkan keseluruhan anggotanya dalam sebuah program yang digagas sendiri oleh organisasi. Kegiatan-kegiatan yang digagas oleh pihak lain dan diikuti oleh IPPHTI pada umumnya hanya melibatkan sejumlah kecil petani anggota IPPHTI yang dijadikan perwakilan. Ini terlihat misalnya pada kegiatan seperti TOT SRI di Jakarta, pelatihan sains dan kepeemanduan di Pandeglang, yang tentunya hanya melibatkan sedikit petani IPPHTI untuk dijadikan perwakilan mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, luasnya wilayah Kabupaten Indramayu dan panjangnya rentang wilayah dari barat ke timur menjadikan menyulitkan komunikasi antar petani anggota IPPHTI dan berakibat pada buruknya koordinasi organisasi.

Pada tahun 2002 IPPHTI Kabupaten Indramayu mengadakan kerja sama dengan Yayasan FIELD Indonesia dalam suatu program yang disebut PEDIGREA. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan pemuliaan tanaman pada petani di Kabupaten Indramayu. Keterlibatan IPPHTI dalam program ini terbatas pada keterlibatan individu-individu petani tertentu misalnya sebagai Petani Pemandu atau terlibat sebagai Tim Pemantau Lapangan (TPL).

Kegiatan pelatihan pemuliaan tanaman di Kabupaten Indramayu diawali dengan adanya TOT (*training of trainers*) yang diadakan di Sukabumi. Pada TOT ini Indramayu diwakili oleh lima orang petani. Pada tahap selanjutnya, alumnus dari pelatihan ini mengadakan SL (*sekolah lapang*) di Indramayu untuk melatih petani-

petani lainnya guna memperkenalkan praktik pemuliaan tanaman. Pada tahap awal, SLPT ini dilakukan di Kecamatan Nunuk. Selanjutnya, peserta TOT I yang diadakan di Sukabumi ditugasi sebagai ‘petani pemandu’ untuk mengadakan TOT II guna mempersiapkan pemandu-pemandu lainnya untuk memandu di Kecamatan Widasari, Kecamatan Kedokanbunder, dan Kecamatan Juntinyuat. Pada perkembangan berikutnya sampai dengan tahun 2007 dalam wilayah Indramayu terdapat sebelas kelompok binaan di sebelas kecamatan antara lain Kecamatan Lelea, Kecamatan Widasari, Kecamatan Kedokanbunder, Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Bangodua, Kecamatan Sukra, Kecamatan Sliyeg, Kecamatan Gabuswetan, Kecamatan Kertasemaya, Kecamatan Kroya dan Kecamatan Bongas (lihat gambar 04). Kelompok-kelompok tani yang menjadi sasaran kegiatan pemuliaan tanaman pada dasarnya merupakan kelompok tani yang memang sudah terbentuk sebelum kegiatan pemuliaan tanaman dilakukan, sebagai wadah untuk menerima bantuan pemerintah semisal Kredit Usaha Tani (KUT), atau program-program pemerintah lainnya. Ada juga kelompok yang terbentuk sebagai hasil ‘pembenahan’ yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu atas kelompok-kelompok yang telah ada sebelumnya, atau kelompok-kelompok yang terbentuk dari inisiatif petani sendiri guna menanggulangi hama tikus pada satu hamparan (buletin ‘Bunga Padi’ edisi IV, 2006)



Gambar 04. Lokasi Sekolah Lapang Pemuliaan Tanaman (SLPT)

Selama berlangsungnya program PEDIGREA, kelompok tani yang tersebar di sebelas kecamatan tersebut dikenal sebagai 'kelompok binaan' yang mengacu pada binaan dari Yayasan FIELD Indonesia. Aktivitas pemuliaan tanaman itu meliputi teori dan sekaligus praktik pada lahan studi dengan tempat dan waktu yang di tetapkan secara musyawarah atas kesepakatan bersama. Selain itu, juga terdapat kegiatan pengamatan, pencatatan data hasil pengamatan, dan diskusi tentang pemecahan masalah yang terjadi di lahan studi kelompok. Ada banyak kendala yang dihadapi, baik itu yang terkait dengan kondisi tanaman di lahan studi, hubungan antarpeserta, peserta dengan pemandu, antarpemandu itu sendiri, kelompok yang bersangkutan dengan masyarakat sekitar atau tokoh masyarakat yang tidak selamanya mendukung misalnya aparat pada tingkat desa dan kecamatan.

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama berlangsungnya perogram PEDIGREA, Yayasan FIELD Indonesia kemudian menerapkan strategi dengan melibatkan petani-petani itu sendiri dalam aktivitas yang berkaitan dengan kepanitiaan, melibatkan petani dalam aktivitas monitoring kegiatan dan manajemen keuangan. Dalam sebuah rapat di suatu lokakarya petani yang diadakan oleh Yayasan FIELD Indonesia, di Kecamatan Lelea, disepakati mengenai adanya TPL (Tim Pendukung Lapangan) yang anggota-anggotanya merupakan petani peserta program PEDIGREA itu sendiri. Terpilihlah tiga orang petani sebagai anggota TPL yaitu H. Masroni, pak Warsiah, dan Nining.

Pengaturan status dan peran dalam program PEDIGREA yang dilakukan oleh Yayasan FIELD Indonesia ini telah menciptakan individu-individu yang dominan di kalangan petani pemulia tanaman di Kabupaten Indramayu dalam kapasitasnya sebagai 'petani PEDIGREA', bukan dalam kapasitasnya sebagai 'petani IPPHTI'. Seperti misalnya pak Warsiah yang sering melakukan pemantauan (sebagai TPL) ke sebelas kelompok tani, lebih dikenal sebagai 'orang FIELD' alih-alih pengurus IPPHTI Kabupaten Indramayu. Terlebih pula pengurus IPPHTI tidak dalam setiap lokakarya petani yang membahas perkembangan aktivitas pemuliaan tanaman (menurut keterangan H. Masroni, pada masa-masa awal pelaksanaan program PEDIGREA perwakilan IPPHTI selalu diundang dalam lokakarya bulanan yang

diselenggarakan oleh Yayasan FIELD. Namun dalam perjalanan selanjutnya pengurus IPPHTI tidak pernah lagi diundang dan tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan program). Pemunculan individu-individu lebih diutamakan alih-alih melakukan pembinaan manajerial kelompok-kelompok tani yang terlibat dalam program. Hal ini mengindikasikan bahwa peran IPPHTI menjadi tidak jelas karena pada perkembangannya, seluruh kegiatan yang dilakukan dalam program PEDIGREA, Yayasan FIELD Indonesia langsung berurusan dengan petani tanpa melalui musyawarah dengan IPPHTI.

“Kami Petani IPPHTI”: Munculnya Kesadaran Identitas di Kalangan Petani Pemulia Tanaman Kabupaten Indramayu

Pada pertengahan bulan Pebruari 2007 program kerja sama dalam bentuk kolaborasi antara UI dan petani pemulia tanaman Indramayu telah berlangsung kira-kira delapan bulan dan memasuki tahap *editing* film setelah pengambilan gambar di lapangan sesuai dengan *story line* tentang aktivitas petani, terutama yang menyangkut kegiatan pemuliaan tanaman. Dalam tahap ini, tim Indramayu dan Tim UI bersama-sama menyusun *editing script* berdasarkan stok gambar yang ada.

Pada saat berlangsungnya proses *editing*, isu mengenai peran Yayasan FIELD Indonesia dalam film mulai muncul dan dipertanyakan. Yayasan FIELD Indonesia mempertanyakan tentang keberadaan logo yayasannya dalam film. Selain itu, Yayasan FIELD Indonesia juga meminta data gambar rekaman (*footage*) kepada Tim UI yang dianggap memiliki kewenangan memberikan. Tim UI tidak bersedia memberikan keseluruhan data rekaman gambar (*footage*) tersebut kepada Yayasan FIELD Indonesia kecuali bagian-bagian yang memang diperlukan untuk kepentingan yang jelas, karena sejak awal kerja sama dilakukan dengan petani Indramayu, tidak dengan Yayasan FIELD Indonesia.

Petani-petani pemulia tanaman yang terlibat dalam tim Indramayu bereaksi terhadap persoalan ini. Isu yang muncul dan mengemuka pun adalah isu mengenai kepemilikan. Yayasan FIELD Indonesia merasa bahwa kegiatan yang dilakukan oleh

UI dan petani merupakan aktivitas pendokumentasian program PEDIGREA yang berarti juga pendokumentasian program yang dilakukan oleh Yayasan FIELD Indonesia. Oleh karena itu, mereka juga berhak atas kepemilikan gambar rekaman yang dibuat. Itu adalah persepsi Yayasan FIELD Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang staf lapangan mereka saat diadakannya *preview* film. Salah seorang staf lapangan Yayasan FIELD Indonesia yang hadir mengatakan:

“...kalo gak salah itu yang gua tahu, pertama sosialisasi dan dokumentasi PEDIGREA, entar! Entah gua salah denger atau kurang informasi, gak tau juga deh ya. Tapi gak tau juga yah, yang gua tahu seperti itu, bahwa tujuan pembuatan filmnya, pendokumentasian PEDIGREA, akan disosialisasi gitu...”

Petani dan UI merespon secara tegas bahwa apa yang dilakukan selama ini dalam program *Bisa Dèwèk* bukanlah semata pendokumentasian program PEDIGREA sebagaimana yang dipersepsikan oleh Yayasan FIELD Indonesia selama ini. Yang dilakukan adalah pendokumentasian perubahan fenomena pertanian yang berlangsung di Kabupaten Indramayu, yakni dari menyeleksi benih dimasa sebelum revolusi hijau kemudian membeli dan menanamnya, hingga mereka mampu membuat benih sendiri dengan cara memuliakan. Fenomena perubahan itulah yang sebenarnya direkam dan diamati. Jadi bukan semata merekam aktivitas pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh Yayasan FIELD dalam program PEDIGREA itu. Hal ini ditegaskan oleh koordinator program *Bisa Dèwèk* (Yunita T. Winarto) dalam satu kesempatan berdialog (masih dalam kesempatan diskusi sehabis melakukan *preview* film) dengan pihak Yayasan FIELD Indonesia. Dia menegaskan:

“Dokumentasi bukan dokumentasi PEDIGREA-nya tetapi dokumentasi perubahan fenomena bahwa petani yang dulunya hanya menyeleksi dan kini jadi pemulia dan ini ada perubahan dan itu mereka mengumpulkan kembali kebudayaan lokal itu, pak. Jadi bukan SL-nya itu...” (DR. Yunita)

Dalam tahap selanjutnya tim UI dan tim Indramayu merespons permintaan pihak Yayasan FIELD Indonesia dengan bersepakat untuk tidak memberikan data

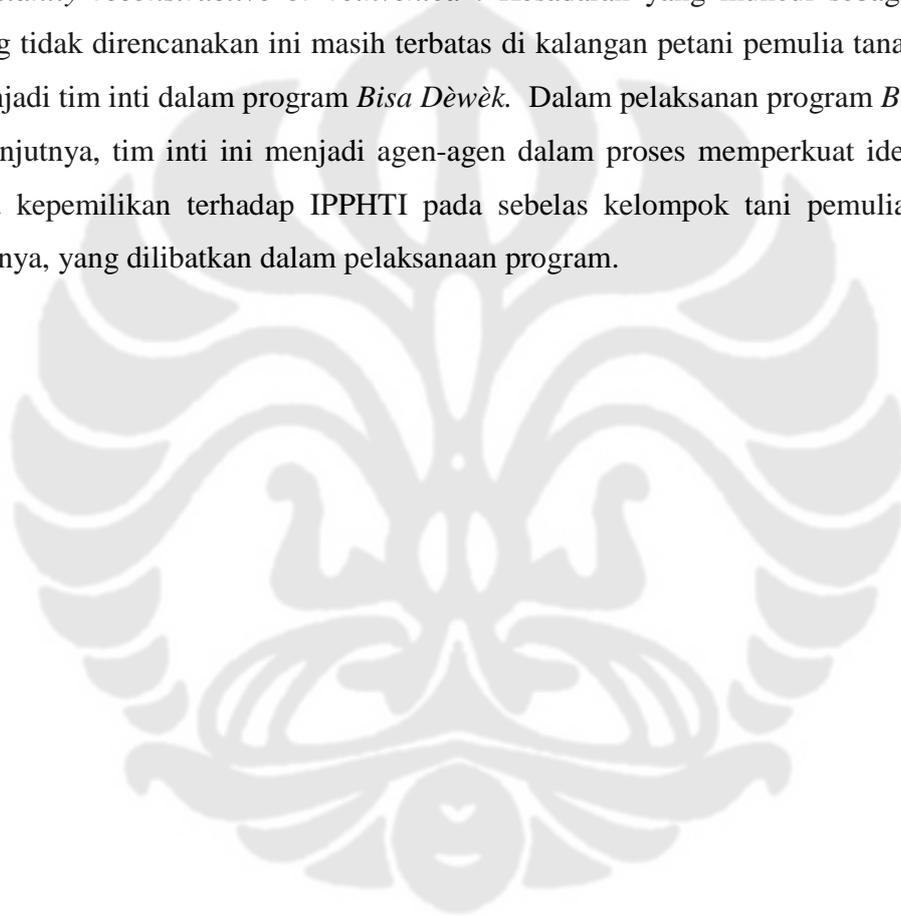
gambar rekaman (*footages*) kepada yayan FIELD Indonesia. Pihak UI lalu merancang dan membuat suatu *draft* kerja sama/ *Memorandum of Understanding* untuk mempertegas bentuk kerja sama antara pihak UI dan pihak petani pemulia tanaman Indramayu, hak dan kewajiban masing-masing dalam memiliki dan memanfaatkan, serta menyebarluaskan produk film *Bisa Dèwèk*.

Di sinilah kemudian muncul kesadaran di kalangan individu-individu petani pemulia tanaman yang terlibat dalam kerja sama ini (*Bisa Dèwèk*), tentang identitas kolektif mereka sebagai petani IPPHTI Kabupaten Indramayu. Dalam kesepakatan kerja sama yang dibuat, individu-individu petani pemulia tanaman tersebut merepresentasikan diri sebagai petani-petani yang berada di bawah naungan IPPHTI Kabupaten Indramayu. Setelah sekian lama identitas tersebut ‘tertidur’ dan tidak diaktifkan, untuk pertama kalinya identitas kembali diaktifkan. Mereka merujuk pada kenyataan bahwa secara historis, program PEDIGREA yang dijalankan oleh Yayasan FIELD Indonesia semula juga merupakan sebuah program kerja sama antara Yayasan FIELD Indonesia dengan IPPHTI Kabupaten Indramayu sebagai sebuah organisasi. Namun, tidak ada kesepakatan kerja sama antarlembaga yang dilakukan.

Setelah identitas petani-petani pemulia tanaman tersebut terbangun, yaitu identitas kolektif mereka sebagai petani IPPHTI Kabupaten Indramayu, isu mengenai kerja sama secara kelembagaan pun mulai dibicarakan. Pada tanggal 29 April 2007, yaitu setelah program *Bisa Dèwèk* berlangsung selama kurang lebih sepuluh bulan, kerja sama secara kelembagaan diwujudkan dengan mengunjungi Koordinator Umum IPPHTI Kabupaten Indramayu (H. Sarma). Hubungan kerja sama antara UI dan Petani pemulia tanaman Kabupaten Indramayu beralih dari hubungan antara ‘tim UI’ dan ‘tim Indramayu’ menjadi hubungan kerja sama antara tim UI dan IPPHTI Kabupaten Indramayu sebagai identitas kolektif para petani pemulia tanaman Kabupaten Indramayu.

-oo0oo-

Pemaparan dalam bab ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan program *Bisa Dèwèk* telah memunculkan kesadaran tentang identitas atau jatidiri petani pemulia tanaman sebagai petani IPPHTI Kabupaten Indramayu. Ini sejalan dengan anggapan bahwa identitas merupakan sesuatu yang ‘diproduksi’, tidak pernah selesai dan selalu dalam proses. Barth (dalam Pirous, 2005) juga mengacu pembentukan identitas sebagai sesuatu yang: “...as being contingent, dynamic, responsive, permutable, and constantly reconstructive or reinvented”. Kesadaran yang muncul sebagai sesuatu yang tidak direncanakan ini masih terbatas di kalangan petani pemulia tanaman yang menjadi tim inti dalam program *Bisa Dèwèk*. Dalam pelaksanaan program *Bisa Dèwèk* selanjutnya, tim inti ini menjadi agen-agen dalam proses memperkuat identitas dan rasa kepemilikan terhadap IPPHTI pada sebelas kelompok tani pemulia tanaman lainnya, yang dilibatkan dalam pelaksanaan program.



BAB III

PROSES PENGUATAN IDENTITAS IPPHTI DAN PETANI *BISA DÈWÈK*

Bab ini akan mengulas proses menguatnya identitas/jatidiri kolektif petani pemulia tanaman sebagai petani IPPHTI yang telah terbangun pada saat pelaksanaan program *Bisa Dèwèk* memasuki tahap akhir pembuatan film. Identitas sebagai petani IPPHTI yang muncul pada proses akhir penyuntingan film *Bisa Dèwèk* itu direpresentasikan oleh para petani dalam berhadapan dengan *the others*. Pada tahap ini, identitas dan jatidiri kolektif yang telah muncul dan terbangun diperkuat dan disebarkan pada petani-petani lainnya di kelompok tani sebelas kecamatan. Terbangunnya identitas tersebut yang pada mulanya merupakan suatu gejala yang tidak direncanakan, dijadikan pembelajaran oleh para petani dan memunculkan tindakan yang disengaja untuk memperkuat IPPHTI serta memperkuat nilai-nilai *Bisa Dèwèk* yang mengandung nilai-nilai kemandirian. Proses penguatan identitas ini berlangsung dalam serangkaian kegiatan mendiseminasikan film *Bisa Dèwèk* melalui apa yang disebut petani dengan *ngamèn*. Petani yang tergabung dalam tim inti program *Bisa Dèwèk* bertindak sebagai agen-agen yang berperan dalam menjadikan identitas itu sebagai milik bersama. Hal ini menunjukkan adanya usaha dari agen-agen tersebut membangun sebuah ‘kepemilikan bersama’ (*shared belongin*) yang dalam hal ini berupa identitas IPPHTI dan identitas *Bisa Dèwèk* yang mengandung nilai-nilai kemandirian petani. Ini sejalan dengan pendapat Gilroy (1997:301–302 dalam Jenkins, 2008) yang mengatakan bahwa: “*identity is always particular, as much about difference as about shared belonging . . .*”. Selanjutnya untuk melihat dinamika yang terjadi yang berkaitan dengan identitas dan perubahan, Jenkins (2008) menyarankan untuk mengaitkan identitas dengan adanya gerakan bersama (*collective mobilization*) untuk mencapai tujuan bersama (*shared objectives*). Jenkins (2008:24) mengatakan: “*Focusing only, or even mainly, on difference is unhelpful if one wants to understand social change, in that it doesn’t accord with observable realities. Put simply, collective mobilisation in the pursuit of shared objectives is a characteristic theme of history and social change*”. Bagaimanakah

keterkaitan antara pengaktifan identitas kolektif petani-petani pemulia tanaman dengan dimunculkannya ide tentang tujuan bersama (*shared objectives*) itu dapat memperkuat identitas kolektif mereka sebagai petani IPPHTI dan sebagai petani *Bisa Dèwèk*?

Dalam proses penguatan identitas sebagai petani IPPHTI, agen-agen yang terlibat dalam program *Bisa Dèwèk* memroduksi sebuah ‘gambaran bersama’ (*collective imagining*) untuk membangkitkan apa yang disebut oleh Jenkins (2008) sebagai ‘*one of the things that people have in common*’ sebagai sesuatu yang membedakan suatu kelompok atau kategori tertentu dengan kelompok atau kategori lainnya. Dalam bab ini, akan diuraikan proses pembentukan ‘*collective imagination*’ yang dilakukan oleh agen-agen yang terlibat dalam program *Bisa Dèwèk* dan menyebarkannya pada kelompok-kelompok tani lainnya di sebelas kecamatan selama berlangsungnya program *Bisa Dèwèk*. Dalam bab ini juga akan diuraikan bagaimana proses penguatan identitas sebagai petani IPPHTI terjadi sebagai alat untuk mencapai ‘*common objectives*’ (Jenkins, 2008).

Lokakarya Awal di Kalensari: Membangun *Common Objective*

Selama berlangsungnya program *Bisa Dèwèk*, upaya untuk memperkuat identitas para petani sebagai petani IPPHTI terus dilakukan, terutama pada sebelas kelompok yang sebelumnya mengikuti program PEDIGREA yang telah memberikan bekal bagi mereka kemampuan dalam memuliakan tanaman. Salah satu upaya yang bertujuan untuk memperkuat identitas mereka ialah dengan mengadakan lokakarya yang menyertakan perwakilan-perwakilan petani dari sebelas kelompok tani, dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang apa itu IPPHTI, sekaligus tentang tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program *Bisa Dèwèk*.

Lokakarya persiapan pemutaran film *Bisa Dèwèk* (selanjutnya disebut Lokakarya Awal) berlangsung pada awal bulan Mei 2007 di Desa Kalensari. Agenda utamanya adalah untuk menyiapkan pemutaran film *Bisa Dèwèk* di sebelas kecamatan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya sebagai salah satu acara dalam rangkaian keseluruhan program *Bisa Dèwèk*. Kegiatan ini berlangsung di halaman rumah H. Masroni yang memang luas. Lokakarya ini

sendiri dihadiri selain oleh petani dari sebelas kecamatan, juga oleh perwakilan pemerintahan setempat, yaitu dari tingkat desa sampai kecamatan, serta petugas pertanian tingkat kecamatan.

Dalam Lokakarya Awal ini, H. Sarma dalam sambutannya sebagai Koordinator Umum IPPHTI Kabupaten Indramayu memberikan penegasan kepada para perwakilan petani yang hadir bahwa IPPHTI Kabupaten Indramayu merupakan organisasi yang mendasarkan diri pada ilmu pengetahuan tentang pertanian, berbeda dengan kelompok tani lainnya yang ada. Ia mengatakan:

“Jadi IPPHTI ini menjadi wadah segala apa pun ada, sampai SPL (Sistem Pangan Lokal), sayur-sayuran pun (pemuliaan sayuran) ada. Apalagi kita bisa menciptakan obat-obatan. Obat-obatan dari organik, pestisida organik, pupuk organik, dan yang lainnya juga bisa, herbi juga bisa. Itulah IPPHTI...”

Dalam lokakarya ini secara resmi dilakukan serah terima *copy* DVD film *Bisa Dèwèk* dari tim UI yang diwakili oleh Yunita T. Winarto kepada H. Sarma sebagai Koordinator Umum IPPHTI Kabupaten Indramayu. Serah terima ini menandai adanya hubungan kerja sama secara resmi antara dua lembaga, yaitu UI sebagai institusi akademik dengan IPPHTI Kabupaten Indramayu sebagai wadah yang menaungi para petani pemulia tanaman di Indramayu. Serah terima ini dilakukan di depan para petani pemulia tanaman sebagai wakil dari kelompok mereka masing-masing di sebelas kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan penegasan kepada semua kelompok yang hadir, termasuk wakil pemerintah desa dan kecamatan yang hadir bahwa program *Bisa Dèwèk* merupakan program yang terselenggara atas kerja sama antara dua institusi secara sejajar yaitu antara UI dan IPPHTI Kabupaten Indramayu.

Dalam pidato pembukaan yang dilakukan di depan para peserta lokakarya yang hadir, H. Masroni selaku koordinator program memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya program *Bisa Dèwèk* itu dan tujuan apa saja yang hendak dicapai dari penyelenggaraan program. Penuturannya dalam pembukaan lokakarya adalah sebagai berikut:

”Program ini terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama ini yang kita sebut Lokakarya Awal yang bertujuan untuk menyosialisasikan kepada perwakilan kelompok yang diundang dan penyusunan pemutaran film di sebelas

kecamatan... Tahap kedua dari program adalah pemutaran film di tiap-tiap kecamatan yang waktunya akan ditentukan bersama... Akhir dari seminar diharapkan suatu dukungan dari Bupati Indramayu dan seluruh jajarannya dari tingkat Kabupaten setelah melihat, menimbang, dan mendengar secara langsung presentasi kegiatan dan film *Bisa Dèwèk*. Dukungan dari pemerintah akan sangat berguna dan dibutuhkan untuk kelangsungan program kegiatan pemuliaan benih...”

Dengan gaya bahasa yang formal dalam suatu pidato H. Masroni menyampaikan kepada para peserta lokakarya yang hadir tentang tujuan dan tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam pelaksanaan program *Bisa Dèwèk* yang sedang dijalankan. Penginformasian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi kepada seluruh kelompok di sebelas kecamatan tentang orientasi dan strategi yang akan dijalankan. Selain itu, penegasan ini lebih jauh mengandung unsur ajakan untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai yang dijadikan sebagai tujuan bersama. Di sinilah terlihat bahwa apa yang dikatakan oleh H. Masroni tersebut di atas merupakan suatu usaha membangun ‘tujuan bersama’ (*common objective*) yang disampaikannya pada seluruh petani perwakilan dari sebelas kelompok untuk membangkitkan rasa memiliki terhadap program yang sedang dilaksanakan, dan membangun tujuan bersama yang akan dicapai dan diperjuangkan oleh IPPHTI. Di sisi lain, H. Sarma sebagai Koordinator Umum IPPHTI Kabupaten Indramayu memberikan pemahaman tentang apa yang dimiliki oleh IPPHTI yang dicirikan oleh pengetahuan atau sains petani. ciri atau karakteristik itu mengukuhkan apa yang disebut oleh Jenkins (2008) sebagai: ‘*one of the things that people have in common*’. Penegasan tentang adanya ‘sesuatu yang dimiliki bersama’ oleh IPPHTI menunjukkan adanya perbedaan antara IPPHTI dengan kelompok-kelompok tani lain sebagai *the others*.

Setelah acara lokakarya resmi dibuka (dimulai), peserta lokakarya dibagi berdasarkan kelompok satu kecamatan untuk mendiskusikan keperluan alat, bahan, dan rencana undangan di tiap kelompok untuk kegiatan pemutaran film di tiap-tiap kecamatan. Pada setiap kelompok dibagikan kertas plano untuk menuliskan hasil diskusi mereka masing-masing untuk nanti dipasang di papan

tulis. Kertas plano dipakai untuk menuliskan pihak-pihak mana saja yang akan diundang dalam pemutaran film di kecamatan nanti.

Keterlibatan saya dalam kegiatan lokakarya ini memungkinkan saya untuk melakukan observasi terlibat secara langsung sekaligus mengamati dari jarak dekat aktivitas mereka. Pada salah satu kelompok, yaitu kelompok tani dari Kecamatan Sliyeg, Pak Taryana selaku ketua kelompok diskusi menulis nama-nama siapa saja yang direncanakan untuk diundang dalam kegiatan pemutaran film nanti yaitu utusan dari Dinas Pertanian Kecamatan sebanyak empat orang, perwakilan KTNA lima orang, petani galur sebelas orang, Kuwu 3 orang, petani SL 30 orang, petani non-SL (termasuk tokoh masyarakat) 20 orang.

Di sinilah kemudian dilakukan rembug untuk menyamakan persepsi para petani pemulia tanaman dari sebelas kecamatan tentang pelaksanaan program *Bisa Dèwèk*. Di sini dikemukakan tujuan dari pelaksanaan program *Bisa Dèwèk* yang melibatkan kelompok dari sebelas kecamatan yang dilibatkan. Lokakarya ini berlangsung dengan teratur dan menuntut keterlibatan aktif dari seluruh peserta yang merupakan anggota kelompok tani, setiap sesinya dipimpin oleh seorang yang mereka sebut “pemandu”. Sebagai seorang pemandu, pada suatu sesi pak Nurkilih membantu memberikan arahan pada seluruh kelompok peserta Lokakarya dengan membuat ilustrasi di papan tulis berupa format tabel yang memuat apa saja yang harus ada dalam perencanaan (lihat tabel 05).

Jenis Kegiatan	Waktu	Yang Terlibat	Materi
1. Pertemuan Persiapan			
2. Pertemuan Awal			

Tabel 05. Contoh format tabel dalam Lokakarya Awal untuk mencatat kegiatan persiapan pemutaran film di tiap-tiap kelompok

Ketika pak Nurkilih membuat dan mengisi *flip chart*, pak Warsiah berdiri dan maju ke depan. Ia mengusulkan agar tabel yang dicontohkan tersebut dibuat dan dilanjutkan sendiri pengerjaannya oleh masing-masing kelompok tani. “Yang ini hanya contoh saja”, kata Pak Warsiah menambahkan. Tabel dicontohkan untuk

mempermudah pengorganisasian dan pencatatan hasil-hasil kesepakatan di tiap-tiap kelompok nanti setelah mereka pulang dari lokakarya guna menyiapkan pemutaran film.

Diskusi berlanjut pada pembahasan tentang rencana kepanitiaan kegiatan pemutaran film *Bisa Dèwèk*. Namun, sebelum diskusi masuk pada topik pembahasan ini, ada beberapa kelompok yang sudah mengambil inisiatif untuk memasukkan jumlah anggota kelompok yang akan menjadi panitia dalam kegiatan pemutaran film. Misalnya kelompok tani dari Kecamatan Bongas menetapkan sepuluh orang sebagai panitia lokal kelompok, kelompok tani Gabus Wetan juga menetapkan jumlah yang sama sebagai panitia lokal.

Beberapa saran kemudian mengemuka perihal jumlah panitia lokal yang sebaiknya ada dalam setiap pemutaran di kecamatan. Pak Warsiah memberikan saran bahwa jumlah panitia lokal yang nanti terlibat cukup dituliskan Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan Seksi Teknis saja. Dalam gaya “kepemanduan” Pak Warsiah juga mengingatkan: “teman-teman petani diharapkan kembali ke tujuan awal bahwa yang penting adalah kita mencari dukungan dari pemerintah”. Usulan lain yang mengemuka terkait antisipasi keamanan dalam kegiatan pemutaran film *Bisa Dèwèk* nanti, dan Pak Nurkilah menyarankan agar dalam kegiatan pemutaran film tersebut turut juga dilibatkan aparat dari Polsek dan Koramil. “Takut ribut-ribut, nanti”, tukas pak Nurkilah.

Pada Lokakarya Awal ini film *Bisa Dèwèk* diputar untuk pertama kalinya dihadapan petani. Menjelang petang, pada hari pertama pelaksanaan lokakarya film diputar dan perwakilan-perwakilan petani yang hadir untuk pertama kalinya berkesempatan menyaksikan film *Bisa Dèwèk*. Pemutaran ini disaksikan oleh semua petani yang hadir, tim UI, Camat Widasari, Kuwu Kalensari, KCD Sukra-Patrol, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra, dan juga perwakilan dari Yayasan FIELD Indonesia. Banyak tanggapan yang dikemukakan oleh para penonton sesuai diputarnya film ini. Ada yang memberikan apresiasi terhadap tayangan tentang perjuangan petani di dalam film. Seperti yang diutarakan oleh dekan Faperta Unwir, pak Asep:

“Saya sangat bangga sekali dengan kemampuan yang dimiliki petani. Kalo saya pribadi sudah menduga bahwa terdapat potensi dalam diri petani yang

sampai hari ini mungkin kurang bisa disadari oleh pemerintah. Saya tadi melihat dari awal bahwa apa yang dilakukan petani itu sangat... sangat... duh terharu juga saya, artinya begini proses partisipatoris itu betul ada... justru disitu kita melihat sesungguhnya petani kita ini berdaya hanya permasalahannya kenapa menjadi tidak berdaya...”

Selanjutnya Dekan Faperta Unwir menegaskan dukungan terhadap perjuangan petani sebagaimana dalam tayangan film *Bisa Dèwèk*. Menurutnya:

”...bahwa kami sendiri dari perguruan tinggi bisa menjadi mediator kepada pemerintah yang ada. Jadi bapak-bapak sekalian kalau ditanya mendukung atau tidak saya sangat mendukung kegiatan ini. Malah saya dari awal saya berusaha bersama-sama kawan-kawan yang lain untuk menjadi fasilitator atau menjadi mediator. Artinya saya ingin menjadikan perguruan tinggi ini menjadi pusat pertanian masyarakat...”

Terdapat kekhawatiran mengenai isi film terkait dengan sikap dari pihak dinas pertanian yang ditayangkan dalam film. Dikhawatirkan hal tersebut menimbulkan kesan memojokkan pihak pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh KCD Widasari sebagai berikut:

“Yang pertama saya klarifikasi saya dari birokrasi kurang setuju dengan penampilan dua orang petugas yang kalo saya melihatnya itu sepertinya kita akan memojokkan pemerintah. Tapi coba kalo yang diwawancarai itu yang mengambil keputusan, mungkin hasilnya akan berbeda pendapatnya...”

Pada hari kedua pelaksanaan lokakarya, siang hari selagi diskusi tengah berlangsung, sekitar pukul sebelas, Pak Abdul Mu'in yang menjabat sebagai KCD (Kepala Cabang Dinas Pertanian) Kecamatan Sukra-Patrol datang dan kemudian langsung bergabung dalam diskusi. Kehadiran Pak Abdul Mu'in dalam acara ini memperlihatkan adanya perhatian dari pihak pemerintah terutama dinas pertanian, walaupun lingkungannya masih individu.

Setelah kebutuhan terkait peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemutaran film terdata, setiap kelompok membuat perhitungan anggaran dan menuliskan harga peralatan dan bahan-bahan tersebut. Perhitungan harga tersebut kemudian diserahkan pada pemandu (ketua sidang). Ketika seluruh kelompok sedang membuat kalkulasi kebutuhannya, H. Masroni menuliskan pada *flip chart* jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan pemutaran Film *Bisa*

Dèwèk. Jumlah dana yang dialokasikan pada setiap kecamatan untuk pemutaran film adalah sebesar Rp.640.000,00. “Silakan dibagikan pada keperluan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemutaran film”, ujar H. Masroni saat memandu acara.

Kesepakatan mengenai jadwal pemutaran film di masing-masing kecamatan kemudian disepakati, karena memang merupakan satu agenda penting dalam lokakarya ini. Sebelum kesepakatan dapat dibuat, seperti biasa perdebatan kembali terjadi berkenaan dengan adanya permasalahan bahwa ada satu kecamatan yang mempunyai dua kelompok tani. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh pak Nurkilah sebagai pemandu yang mengatakan bahwa: “Kelompok yang ada dua dalam satu kecamatan disebut sebagai kelompok tidak normal, dan kelompok yang ada hanya satu dalam satu kecamatan disebut sebagai kelompok normal”. Permasalahan ini mendapat perhatian khusus dan dirasa perlu oleh peserta dan panitia memperoleh jalan keluar dengan mendiskusikannya lebih lanjut. Para perwakilan kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok ‘tidak normal’ kemudian memberikan usulan. pak Karjita misalnya, mengusulkan agar: “...pemutaran digabung jadi satu aja... di tengah-tengah, di Balai Desa. Sementara itu pak Watori dari Malang Sari berujar “...pengen pemutaran ini dipisah dari Kalensari”. Pak Warka menginginkan pemutaran dilakukan di tiap kelompok masing-masing. Perdebatan mengenai pemutaran di kecamatan ini kemudian berakhir dengan kesepakatan bahwa kecamatan yang memiliki dua kelompok tani akan dihitung sebagai satu kelompok. Pemutaran film hanya akan dilaksanakan satu kali dalam satu kecamatan. Akhirnya dalam lokakarya persiapan pemutaran film *Bisa Dèwèk* di Kalensari itu, disepakati rencana pemutaran film *Bisa Dèwèk* di sebelas kecamatan pada sebelas kelompok tani, (lihat tabel 05)

Tabel 05. Jadwal pemutaran film di sebelas kecamatan berdasarkan rapat persiapan di Kalensari. (Lihat juga Prahara, 2008)

No	Kecamatan	Waktu Pemutaran	Tempat
1	Kertasemaya	15 Mei 2007	Balai Desa
2	Juntinyuat	19 Mei 2007	Balai Desa
3	Nunuk	21 Mei 2007	Balai Desa
4	Bongas	30 Mei 2007	Rhm.Pak Sukidi
5	Cangkingan	02 Juni 2007	Balai Desa
6	Sliyeg	08 juni 2007	Lapangan
7	Malangsari	09 juni 2007	-
8	Mulyasari	10 juni 2007	Balai Desa
9	Kroya	12 juni 2007	-
10	Gabuswetan	13 juni 2007	-
11	Sukra	Belum ditentukan	-

Catatan: rencana lokakarya dan diseminasi film *Bisa Dewek* di Desa Malangsari kemudian dibatalkan karena kondisi desa yang kurang kondusif terkait dengan pemilihan kepala desa. Dalam perjalanan berikutnya, terdapat penambahan tempat lokakarya dan diseminasi film *Bisa Dèwèk* di dua tempat lainnya, yaitu Sukadana (11 Juni 2007) dan Patrol pada bula yang sama. (sumber: catatan lapangan peneliti. Lihat juga Winarto dkk, 2007, Prahara, 2008)

Lokakarya Awal yang berlangsung di Desa Kalensari itu memperlihatkan usaha yang dilakukan oleh agen-agen yang terlibat dalam tim Indramayu untuk memperkuat identitas ke-IPPHTI-an yang ada di kelompok-kelompok tani di sebelas kecamatan. Perwakilan petani yang hadir dalam Lokakarya Awal tersebut sebelumnya lebih sering berkumpul dalam konteks sebagai petani PEDIGREA. dan Momen pertemuan dalam Lokakarya Awal ini dijadikan langkah awal bagi

representasi kegiatan sebagai anggota IPPHTI Kabupaten Indramayu. Selain itu, nilai kemandirian dalam program *Bisa Dèwèk* juga mulai diperkuat dan menjadi landasan untuk menjalankan program. Hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh tim inti program *Bisa Dèwèk* pada perwakilan petani dari sebelas kecamatan dalam kesempatan memandu acara, bahwa dalam menjalankan program, sifat kemandirian harus diperlihatkan. menurut pak Nurkilah:

“...kita memang perlu dukungan dari pemerintah tapi kita harus punya program sendiri dan jangan tergantung dari pihak lain...”

Nilai kemandirian petani menjadi sesuatu yang memperoleh perhatian besar dan selalu ditekankan pada perwakilan petani yang hadir. Menurut pak Warsiah saat membantu pak Nurkilah memandu acara, para petani harus belajar membuat hajat kelompok. Karena tujuan dari perjuangan ini adalah kemandirian maka semua perencanaan diserahkan pada kelompok tani. Kelompok diharapkan mampu merancang sendiri acara-acara yang dibutuhkan oleh petani. Tim *Bisa Dèwèk* akan membantu penyelenggaraan pemutaran film. Namun, pak Warsiyah menekankan bahwa walaupun ada tim yang membantu, diharapkan kelompok tetap berperan besar dalam 'hajat' ini. Dengan dipandu oleh pak Warsiyah petani diminta untuk mengarahkan kegiatan ini pada kegiatan promosi yang ditujukan pada pemerintah dan masyarakat. Hasil diskusinya adalah mempromosikan semua kegiatan yang ada di tiap-tiap kelompok. Menurut H. Masroni pada sesi akhir lokakarya, acara pemutaran film nanti adalah kesempatan bagi kelompok untuk menunjukkan potensi-potensi petani di tiap kelompok.

‘Ngamèn’: Membesarkan Benih-Benih Identitas IPPHTI.

Sebuah mobil angkot warna kuning yang biasanya berisi penumpang terparkir kosong di halaman rumah Pak Haji Masroni, di Desa Kalensari. Beberapa orang petani tampak sibuk keluar masuk rumah dan memindahkan peralatan yang tampak seperti yang biasa dibawa oleh grup *layar tancep* ke dalam mobil. Layar lebar kain putih, *DVD Player*, sebuah proyektor, tiang bambu, peralatan *sound system*, gulungan kabel listrik yang panjang, dan sebuah kaset *DVD* yang pada sampul kotaknya tertera judul: *Bisa Dèwèk*. Ya, sore itu mereka memang sedang merencanakan pemutaran film *Bisa Dèwèk* di salah

satu dari sebelas kecamatan yang telah ditetapkan sebagai lokasi pemutaran film *Bisa Dèwèk*. Mereka sudah siap untuk “*ngamèn*”.

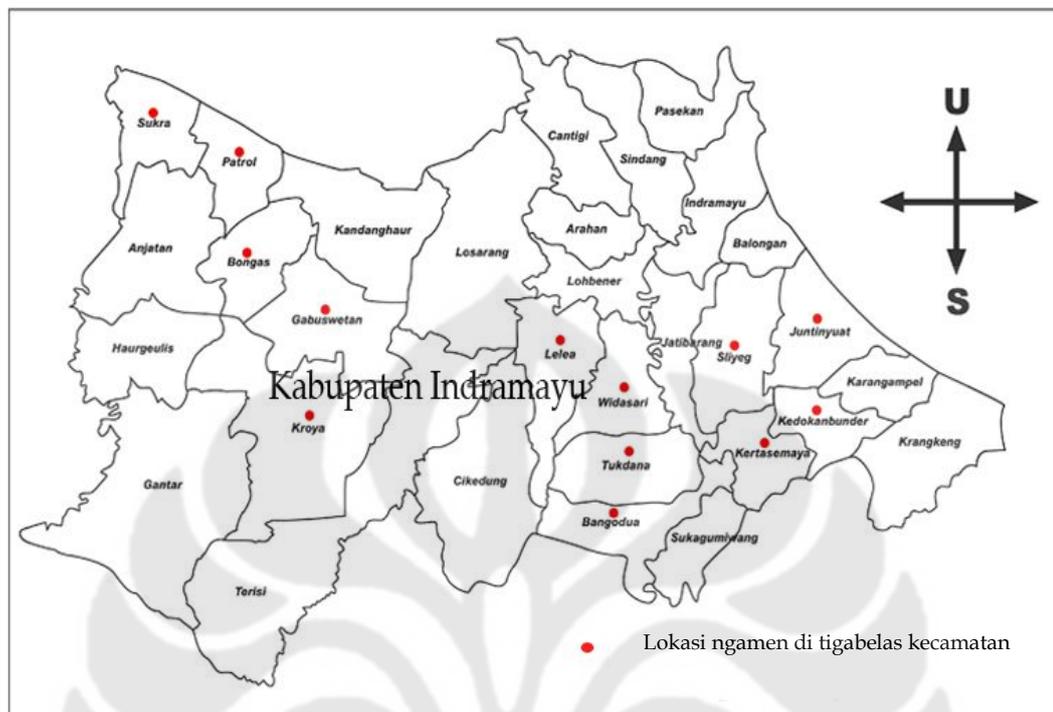
Aktivitas pendiseminasian film *Bisa Dèwèk* di sebelas kecamatan pada sebelas kelompok tani, atau yang biasa disebut dengan istilah *ngamèn* merupakan salah satu tindak lanjut kegiatan Lokakarya Awal di Kalensari. Film *Bisa Dèwèk* diputar dalam lokakarya yang dilakukan di setiap kelompok di sebelas kecamatan. Dalam film itu secara tegas ditunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pemuliaan tanaman dan nilai-nilai kemandirian petani yang hendak didiseminasikan merupakan bagian dari perjuangan IPPHTI Kabupaten Indramayu. Ini ditunjukkan dengan tayangan film yang di akhir film tersebut terdapat lambang IPPHTI dan bekerja sama dengan UI.

Persiapan yang dilakukan pada setiap penyelenggaraan *ngamèn* mencakup persiapan teknis seperti penyediaan peralatan pemutaran film, yaitu *DVD player*, layar yang terbuat dari kain putih, kabel *roll*, peralatan *sound systems*, dan tentu saja kaset film *Bisa Dèwèk* yang akan diputar. Selain itu, persiapan yang tidak kalah penting adalah persiapan yang sifatnya non-teknis tetapi sangat penting yaitu materi yang harus dipaparkan oleh narasumber pada pemutaran film ini. H. Masroni dan pak Warsiah bertindak sebagai narasumber. Mereka berbagi peran dalam memberi penjelasan dan menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh yang hadir.

Karena adanya perubahan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan, akhirnya *ngamèn* dilakukan di duabelas kelompok. Ini berarti total wilayah yang menjadi tempat diselenggarakannya *ngamèn* adalah sebanyak tigabelas termasuk pemutaran perdana di Kalensari (lihat gambar 05).

Ngamèn dilaksanakan untuk pertama kali di Kecamatan Kertasemaya tepatnya di Blok Jengkok yang merupakan tempat kelompok tani Karya Peduli Tani berada. Kelompok tani ini terbentuk karena adanya pelaksanaan program PEDIGREA dan memang sengaja dibentuk untuk menjalankan program tersebut pada tahun 2004. Karena itu, kelompok tani ini menjadi salah satu kelompok sasaran dari pelaksanaan program *Bisa Dèwèk* yang mencakup seluruh kelompok tani yang telah mendapatkan pelatihan pemuliaan tanaman dalam program PEDIGREA. Pada pemutaran film *Bisa Dèwèk* di Jengkok ini, tim pemutaran film

yang juga menyebut diri sebagai tim *Bisa Dèwèk* telah melakukan persiapan sebelumnya di Desa Kalensari yang dijadikan 'home base'.



Gambar 05. Peta tempat pemutaran film *Bisa Dèwèk* di tigabelas kecamatan. (Lihat juga Prahara, 2008)

Menurut pengamatan dan kesan yang tertangkap dari kegiatan *ngamèn* perdana di Jengkok, tim *Bisa Dèwèk* yang mengurus pemutaran film dan bertanggung jawab atas jalannya kegiatan pendiseminasian film masih mencari-cari format dan bentuk acara yang terbaik untuk dilaksanakan agar mendapat hasil maksimal. Hal itu terkait baik dengan permasalahan teknis seperti penyiapan peralatan, maupun dengan permasalahan yang paling penting yaitu menyangkut materi yang akan disampaikan setelah pemutaran film selesai dilakukan. Bagaimanakah menggugah antusiasme para petani yang hadir untuk secara aktif terlibat dalam diskusi yang dilakukan, juga menjadi bahan pemikiran panitia inti.

Pada pemutaran film di tiap kelompok, para petani dilibatkan sebagai panitia lokal untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan, seperti misalnya menyediakan tempat, menyiapkan konsumsi, sampai dengan mengundang aparat desa dan kecamatan, serta petugas pertanian kecamatan. Selain itu, kelompok yang menjadi tuan rumah ini wajib melakukan presentasi

mengenai perkembangan aktivitas mereka di kelompok selama ini (lihat gambar 06). Gambar memperlihatkan sekelompok petani sebagai petani lokal di Kecamatan Bangodua tengah menyiapkan pemutaran film yang menjadi tanggung jawab kelompoknya.



Foto: dokumentasi IPPHTI Kabupaten Indramayu

Gambar 06. Suasana persiapan lokakarya dan pemutaran film *Bisa Dèwèk* di salah satu kelompok tani. Gambar memperlihatkan aktivitas para petani di Desa Mulyasari Kecamatan Bangodua menyiapkan publikasi acara.

Dengan dilibatkannya para petani di tingkat kecamatan dalam menyiapkan acara, tim inti program *Bisa Dèwèk*, yang sebagian besar merupakan pengurus dari IPPHTI Kabupaten Indramayu sebenarnya ingin menumbuhkan rasa kepemilikan pada petani-petani di tiap kelompok basis terhadap IPPHTI. Selama ini, sebelum adanya program *Bisa Dèwèk*, kelompok-kelompok tersebut lebih ‘akrab’ dengan Yayasan FIELD dengan program PEDIGREA-nya yang memperkenalkan pada mereka teknik pemuliaan tanaman. Citra dan gambaran IPPHTI selama ini terkubur di kalangan petani-petani di kelompok pemulia tanaman tersebut karena kurangnya peran yang dijalankan IPPHTI dalam program PEDIGREA. Bahkan, seorang anggota kelompok tani pemulia tanaman di kecamatan Kroya, pak Kiwan, mengakui bahwa dia sebelumnya tidak mengetahui keberadaan IPPHTI, dan menurutnya lagi, pak Warsiah (salah seorang pengurus

IPPHTI) yang terlibat aktif dalam program PEDIGREA dia kira merupakan petugas Yayasan FIELD.

Pada pemutaran film *Bisa Dèwèk*, tujuan yang ingin dicapai selalu ditekankan oleh ‘tim inti’ *Bisa Dèwèk*, sebagaimana yang selalu dikemukakan oleh H. Masroni seusai pemutaran film dalam sesi tanya jawab dengan petani:

“...nah, kemudian kenapa film ini diputar, ini pertama bisa disebarluaskan bahwa tentang persilangan....dan ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kami ingin mengajak kepada pemerintah, khususnya pemerintah tingkat II Indramayu’. Kenapa?karena kami tidak bisa menyebarkan secara sendiri Pak. Petani tidak punya simbol. Petani tidak kuasa. Jadi yang berhak mengadakan program-program selanjutnya adalah pemerintah setempat. Kenapa filmnya diputar? Karena kami ingin memperoleh dukungan”.

Melalui kegiatan pemutaran film keliling ini, terbangun sebuah orientasi dan cita-cita bersama sekaligus sebagai sarana penegasan tujuan kegiatan mereka untuk dapat memperoleh pengakuan dan dukungan secara luas. Selain itu eksistensi kelompok, baik secara keanggotaan maupun aktivitas tercermin secara langsung dari penyelenggaraan pemutaran film *Bisa Dèwèk* di masing-masing kelompok yang menjadi tuan rumah. Kelompok tani tersebut diberi kewenangan untuk menyiapkan dan mengorganisasi kegiatan *ngamèn* itu. Mereka merepresentasikan ke-IPPHTI-an mereka saat berhadapan dengan petani lain, dengan pemerintah desa saat menyiapkan kegiatan, misalnya saat memberi undangan dan mendokumentasikan kegiatan. Ini untuk pertama kalinya petani di tingkat desa merepresentasikan dirinya sebagai petani IPPHTI. Selama ini, dalam kerja sama dengan Yayasan FIELD, mereka tidak pernah melakukan hal tersebut.

Dalam setiap pemutaran film di kelompok, petani yang hadir biasanya mengetahui adanya kegiatan dari informasi yang diberikan oleh panitia lokal di kecamatan baik secara langsung maupun dengan melihat pamflet pengumuman yang disebar. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membicarakan persoalan-persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari yakni persoalan seputar pertanian. Biasanya di setiap pemutaran film petani hadir dengan keingintahuan yang tinggi mendatangi tempat pemutaran film. Terlebih ketika sesi tanya jawab dibuka, mereka dapat menanyakan hal-hal yang memang baru mereka

ketahui seperti pada bagian isi film tentang pemuliaan tanaman, bahkan tidak jarang yang menanyakan hal-hal umum seperti bagaimana cara menanggulangi serangan hama tikus misalnya. Petani yang hadir dalam pemutaran film berbaur dengan hidmat dalam solidaritas sesama petani (lihat gambar 07).



Foto: dokumentasi Program Sarjana Antropologi FISIP UI

Gambar 07. Suasana *ngamèn* di salah satu kelompok tani.

Petani *Bisa Dèwèk*: Petani Mandiri

'*Bisa Dèwèk*' itu sendiri muncul saat diskusi mengenai judul film yang akan dibuat dalam kerja sama antara UI dan petani. Kata *Bisa Dèwèk* merujuk pada pengertian 'bisa sendiri' dan ini mengandung arti tentang nilai kemandirian. Film *Bisa Dèwèk* menunjukkan aktivitas-aktivitas petani yang memperlihatkan bahwa mereka mampu mandiri dengan kreativitasnya dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian (saprota). Pada perjalanan selanjutnya, selain menjadi judul film yang dihasilkan dari program kerja sama antara UI dan petani pemulia tanaman, *Bisa Dèwèk* menjadi nilai-nilai yang melandasi dan menjadi identitas para petani yang sedang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan pemerintah.

Nilai kemandirian itu sendiri sebenarnya telah ada pada petani-petani yang tergabung dalam jejaring IPPHTI Kabupaten Indramayu. Contoh dari penerapan nilai-nilai kemandirian itu ialah kegiatan menyediakan sarana produksi tani

(saprota) secara mandiri dengan membuat alternatif pupuk organik, menyediakan benih sendiri untuk kebutuhan mereka dan membuat pestisida alami untuk keperluan pertaniannya. Menurut pak Warsiah, kebutuhan petani yang banyak dan beragam sebenarnya dapat dipenuhi tanpa harus bergantung atau menjadi tergantung pada pihak lain. Ia mencontohkan, dalam hal pemenuhan kebutuhan pupuk yang terkadang ketersediaannya terbatas, petani tidak perlu harus menjadi terlalu takut dan ‘menjerit-jerit’ sebab tidak adanya pupuk. Petani dapat mencari alternatif lain dengan membuat pupuk organik yang dapat diusahakan sendiri. Begitu juga halnya dengan kebutuhan benih. Petani dapat mengusahakan penyediaan benihnya sendiri tanpa harus tergantung pada ketersediaan benih dari pabrik.

Gagasan petani mandiri (petani *Bisa Dèwèk*) kerap dinyatakan dalam dialog. H. Masroni atau pak Warsiah selalu menekankan pentingnya nilai *Bisa Dèwèk* untuk merujuk pada nilai kemandirian yang harus ada pada petani. Ini terlihat dari setiap adanya dialog sehabis pemutaran film terkait dengan isi film. Narasumber dalam pemutaran film akan menghubungkan nilai tentang kemandirian dengan istilah *Bisa Dèwèk*. Dalam tiap pemutaran film di sebelas kecamatan, nilai *Bisa Dèwèk* menjadi nilai yang berusaha ditanamkan pada petani. Pak Warsiah menuturkan pada para petani yang hadir pada acara *ngamèn*:

“...kebutuhan pupuk, kadang-kadang kekurangan pupuk petani jerit-jerit. Itu kan tandanya belum mandiri. Tetapi jika sudah bisa mencari alternatif pupuk kimia yang dibuat oleh pabrik, itu juga mandiri dalam hal kebutuhan pupuk. Nah terus kebutuhan benih juga. Jika masih pas musim semai benihnya belum ada karena selalu ketergantungan pada pihak lain. Jika kita sudah bisa membuat sendiri, memproses sendiri dan sesuai dengan keinginan kita, apa yang diinginkan, benih-benih kaya apa yang mau ditanam, itu mandiri dalam hal kebutuhan benih. Jadi sebenarnya, kemandirian itu bukan dalam arti punya modal aja tapi agak luas...”

Petani yang mandiri dapat keluar dari permasalahan yang muncul karena tidak adanya atau langkanya saprota (sarana produksi tani) yang dijual di toko, atau untuk mengurangi konsumsi dan biaya yang dikeluarkan petani. Pak Warsiah menambahkan:

“...jadi ada alternatif, ketika pupuk tidak ada harapannya bapak itu bisa bikin sendiri, dengan alternatifnya organik, mungkin konsep-konsepnya ada yang

kayak pak Darmin, mungkin kayak yang lain juga bisa, konsultasi, kalau tidak tau tanya, takonlah, ora keberatan asal bapak bener-bener takon, tapi kula dari tim ngupahi hasilè pak. Jadi kula harapannè, mari pada sama-sama membuat pupuk organik, macem-macem pak misalè, EM4 untuk memajukan jadi kompos, bareng-bareng sajalah...”

Pernyataan pak Warsiah diatas menunjukkan bahwa ketika program *Bisa Dèwèk* bergulir dan proses diseminasi film dilakukan di sebelas kecamatan, kalimat *Bisa Dèwèk* menjadi semacam penunjuk pada nilai-nilai kemandirian yang hendak ditularkan pada petani. Nuansa lokal dari kalimat ini rasanya menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh petani. Ketika berbicara di depan petani pada pemutaran film di Kecamatan Sliyeg H. Masroni menyatakan:

“Jadi harapan kami, dengan pemuliaan benih ini, bukan padinya pak, bukan hasil persilangannya. Tapi harapannya bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa dikuasai oleh petani. Jadi petani, umpama pak Warsiyah menyilangkan benih padi yang cocok untuk di daerahnya sendiri, harapannya di daerah sliyeg juga petani bisa menghasilkan varietas yang cocok dengan di daerahnya sendiri. Jadi *Bisa Dèwèk*-nya muncul. Harapannya seperti itu pak. Jadi bagaimana petani bisa mandiri, bagaimana petani bisa punya ilmu tentang persilangan tentang organik atau apa pun, bukan mengharapkan pihak-pihak lain atau apa lagi pihak perusahaan. Jadi harapan kami bagaimana ilmu itu bisa diserap oleh semua petani...”

H. Masroni menekankan pentingnya memunculkan nilai atau sikap *Bisa Dèwèk* sebagai pembeda dan nilai atau sikap ketergantungan pada pihak lain. Dia mengungkapkan bahwa *Bisa Dèwèk* sebagai sebuah nilai dapat ditumbuhkan dengan dikuasainya pengetahuan tentang pertanian oleh petani seperti pengetahuan pembuatan benih, pupuk organik, dan tidak melulu bergantung pada pihak perusahaan. Ditambahkannya pula bahwa untuk memenuhi kebutuhan petani terkait benih, petani sebenarnya dapat menggunakan benih yang sesuai dengan karakteristik lokal suatu wilayah. Jadi, penggunaan benih yang cocok dengan kondisi lahan dapat diusahakan oleh petani sendiri dengan melakukan persilangan. H. Masroni meyakinkan petani bahwa semua itu dapat dicapai oleh petani jika mereka mau berusaha untuk mandiri. Selain tidak adanya ketergantungan, pola pertanian mandiri juga akan memungkinkan petani untuk memperoleh hasil maksimal karena pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli saprotan (sarana produksi padi) dapat ditekan. Hubungan antara kemandirian dan

maksimalnya keuntungan petani juga dikemukakan oleh pak Warsiah. Ia mengatakan: "Nah yang lain pikirkan bukan pingin apa tapi pendapatane meningkat. Dengan *Bisa Dèwèk* ini pendapatannya bisa meningkat itu..."

Nilai-nilai *Bisa Dèwèk* yang menjadi penunjuk bagi nilai kemandirian petani juga mengandung pengertian bahwa petani harus bersikap aktif dan tidak hanya pasif menjadi konsumen berbagai macam perusahaan yang memasarkan segala macam produknya pada petani. Dalam kesempatan pemutaran film di Bangodua, pak Warsiah mengemukakan bahwa petani saat ini dituntut untuk secara proaktif tidak saja menjadi konsumen ('penonton'), tetapi sudah saatnya petani menjadi 'pemain' yang bisa membuat benih, pupuk organik, menguasai pengetahuan yang luas mengenai itu. Pak Warsiah mengatakan:

"Kalau bikin benih bisa dapat sendiri, *Bisa Dèwèk*. Jadi di era globalisasi ini diharapkan kita petani jangan menjadi penonton, mengandalkan orang lain. Setidaknya jadi pemainlah, bisa bikin pupuk organik, bisa buat bibit punya pengetahuannya. Setidaknya kita mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain. Karena banyak komponen dari petani yang hanya bisa dipenuhi petani, kalau sekarang kan gak ada pupuk banyak yang berjerit, sekarang hati-hati juga pertanian itu juga politik. Bagaimana caranya supaya produksi kita meningkat, yah mudah-mudahan bisa pilih-pilih lah, dan kita melakukan menyebarkan hasil karya kami supaya orang tahu, jadi kemandirian petani mengurangi ketergantungan dengan pihak lain..."

Nilai-nilai kemandirian inilah yang selalu ditekankan pada petani di setiap pemutaran film *Bisa Dèwèk* di sebelas kelompok. Selalu ditekankan upaya agar petani dapat mandiri. Petani dapat '*Bisa Dèwèk*'. Dua potong kata yang semula hanya menjadi judul film dan judul sebuah program, melandasi semangat petani dan telah menjadi penunjuk bagi nilai-nilai kemandirian petani yang ingin disebarkan secara luas.

Kasus Sukadana; Aktualisasi Jatidiri IPPHTI Kabupaten Indramayu

Sub bab ini akan menjelaskan pencapaian aktualisasi IPPHTI sebagai identitas kolektif. Kasus Sukadana menjadi *turning point* penguatan dan legitimasi IPPHTI. Dalam fase ini identitas ke-IPPHTI-an yang telah diperkuat selama proses '*ngamen*' di kelompok basis mendapatkan legitimasi ketika kelompok Sukadana secara resmi berniat bergabung dengan IPPHTI. Pada tahap selanjutnya, dilakukan peresmian kelompok Sukadana sebagai anggota IPPHTI.

Berawal dari ketidaksengajaan, salah seorang petani di Desa Sukadana, pak Sumarno, menemukan majalah 'Bunga Padi' di sebuah toko saprodi (sarana produksi padi) di daerah Jatibarang. Majalah tersebut merupakan sarana informasi kegiatan PEDIGREA yang dikelola oleh Yayasan FIELD Indonesia, terutama mengenai praktik pemuliaan tanaman (lihat Prahara, 2008). Informasi yang ada dalam majalah tersebut menggugah ketertarikan pak Sumarno dan langsung membuka jalur komunikasi dengan salah seorang petani yang namanya tercantum dalam majalah tersebut. Pak Sumarno kemudian menemui pak Ito di Desa Kalensari. Pak Ito merupakan petani IPPHTI dan merupakan orang yang aktif dalam program *Bisa Dèwèk*. Pertemuan dengan pak Ito menghasilkan pengetahuan antara lain mengenai praktik pertanian SRI (*System of Rice Intensification*) dan beberapa varietas padi yang baru diketahui pak Sumarno. Pak Sumarno berniat untuk menyebarkan informasi itu kepada sesama petani lainnya di Desa Sukadana. Pada tahap selanjutnya, para petani Desa Sukadana (pak Sumarno dan kawan-kawan) meminta agar di desanya juga diadakan program fasilitasi untuk memberikan pengetahuan pemuliaan tanaman kepada para petani (lihat Prahara, 2008).

Program *Bisa Dèwèk* yang tengah berlangsung menjadi informasi sekaligus memunculkan inspirasi tersendiri bagi petani Sukadana untuk membentuk kelompok. Dalam hal ini, Pak Ito seringkali menceritakan pelaksanaan program *Bisa Dèwèk* yang melibatkan perkumpulan petani-petani IPPHTI Kabupaten Indramayu. Pak Ito mengundang petani Desa Sukadana untuk hadir dalam acara lokakarya di Desa Kalensari, tanggal 5 Mei 2007, yang sekaligus akan memutar film *Bisa Dèwèk* secara perdana. Dalam pelaksanaan lokakarya dan pemutaran film di Desa Kalensari tersebut, petani Desa Sukadana yaitu pak Sumarno dan dua orang rekannya hadir untuk mengikuti kegiatan. Disitu mereka menyaksikan dinamika kelompok dari sebelas kecamatan yang tergabung dalam jaringan IPPHTI. Selain itu, informasi mengenai pemuliaan tanaman yang terdapat dalam film *Bisa Dèwèk* menarik perhatian mereka. Begitu pula kemandirian petani menggugah keinginan petani Desa Sukadana untuk mendirikan kelompok tani dan bergabung dengan jaringan petani IPPHTI Kabupaten Indramayu.

Keinginan petani Desa Sukadana untuk mendirikan sebuah kelompok tani dan bergabung dalam jaringan petani IPPHTI Kabupaten Indramayu semakin kuat ketika pada acara diseminasi pemutaran film di beberapa kecamatan lainnya (*ngamèn*), mereka hadir dan melihat secara langsung acara yang diselenggarakan. Pada pemutaran film di Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya tanggal 15 Mei 2007, pak Sumarno dan teman petani dari Desa Sukadana hadir lagi dalam acara lokakarya dan pemutaran film *Bisa Dèwèk*. Dalam kegiatan lokakarya dan pemutaran film *Bisa Dèwèk* tersebut terdapat informasi yang sangat menarik dan menggugah para petani Desa Sukadana yang sengaja hadir, yaitu informasi mengenai benih padi hasil persilangan yang diciptakan oleh petani Desa Jengkok. Dalam keterangan yang diberikan oleh *kuwu* (Kepala Desa) Jengkok, benih tersebut mampu menghasilkan padi sebanyak 4 ton 4 kuintal per 300 bata (lihat Prahara, 2008). Hal ini semakin menguatkan rasa petani Desa Sukadana untuk mengenali lebih jauh kegiatan yang ada di IPPHTI dan semakin yakin untuk bergabung dalam jaringan petani tersebut.

Keinginan petani Desa Sukadana untuk bergabung dalam jaringan petani IPPHTI dipertegas dengan kunjungan pak Sumarno dan beberapa orang rekannya sesama petani menemui H. Masroni sebagai perwakilan IPPHTI dalam program *Bisa Dèwèk* (lihat gambar 08). Dalam pertemuan tersebut, petani Desa Sukadana mengajukan dua permintaan. Yang pertama, agar di Desa Sukadana diadakan lokakarya dan pemutaran film *Bisa Dèwèk* untuk menggugah para petani di desa tersebut. Kedua, agar Desa Sukadana diterima sebagai anggota jaringan petani IPPHTI Kabupaten Indramayu, melalui sebuah kelompok tani yang akan segera dibentuk di Desa Sukadana, yaitu kelompok tani Sri Cendana (Sri Cendekiawan Sukadana).



Gambar 08. Pak Sumarno bersama rekan-rekan sesama petani Desa Sukadana mengajukan permohonan untuk bergabung dalam jejaring IPPHTI Kabupaten Indramayu. (Sumber: Dokumentasi *Bisa Dèwèk*)

Respon dari tim *Bisa Dèwèk* terhadap keinginan petani Desa Sukadana terkait keinginan mereka untuk bergabung dengan IPPHTI sangat positif. Begitu juga permintaan mereka untuk diadakan lokakarya dan pemutaran film *Bisa Dèwèk* di Desa Sukadana. Hanya saja, dana untuk penyelenggaraan kegiatan lokakarya dan pemutaran film harus diusahakan oleh petani Desa Sukadana secara swadaya. Untuk permintaan yang kedua yaitu berkenaan dengan keinginan mereka bergabung dalam jejaring IPPHTI, H. Masroni selaku perwakilan IPPHTI dalam program *Bisa Dèwèk* mempersilakan mereka untuk membuat kelompok tani dan bergabung dalam jejaring IPPHTI dengan mengajukan surat permohonan tertulis secara resmi, yang menyatakan untuk bergabung dalam jejaring IPPHTI.

Bergabungnya petani-petani Sukadana (kelompok tani Sri Cendana) menjadi bagian dari jejaring IPPHTI Kabupaten Indramayu memperlihatkan adanya pengakuan atas eksistensi dan peran IPPHTI yang mendapat penilaian positif dari petani. Kelebihan yang dimiliki IPPHTI berupa penguasaan sains petani dan nilai-nilai kemandirian petani menjadi daya tarik utama IPPHTI menurut penilaian petani-petani Sukadana. Inilah yang membuat IPPHTI berbeda dengan organisasi petani lainnya.

'Kelompok Tani Swasta'

Respon yang baik dari IPPHTI dan tim program *Bisa Dèwèk* terhadap keinginan para petani di Desa Sukadana menumbuhkan keyakinan yang kuat di kalangan petani Desa Sukadana untuk membentuk sebuah kelompok tani. Pada tanggal 9 Juni 2007 beberapa orang petani Sukadana antara lain, Pak Sumarno, Layus, Pak Min dan beberapa orang petani lainnya mendiskusikan rencana pembentukan kelompok tani. Hasil diskusi tersebut yaitu menyepakati nama kelompok yaitu Sri Cendana (Cendana: Cendekiawan Sukadana), dan susunan pengurus (lihat Prahara, 2008). Dengan adanya surat permintaan untuk bergabung dengan IPPHTI, kelompok tani Sri Cendana yang baru terbentuk di Desa Sukadana secara resmi dinyatakan tergabung ke dalam anggota dari jejaring petani IPPHTI Kabupaten Indramayu.

Pembentukan kelompok tani Sri Cendana di Desa Sukadana memunculkan respon yang menarik dari kelompok tani lainnya yang tergabung dalam KTNA (Kelompok Tani dan Nelayan Andalan) di desa tersebut. Pada saat peresmian kelompok tani Sri Cendana, salah seorang petani yang merupakan anggota KTNA mempertanyakan status dari kelompok tani yang inisiatif pendiriannya ini langsung dari aspirasi petani. Hal ini terkait dengan status kelompok tani yang menurutnya bukan kelompok tani yang resmi. Kelompok tani yang resmi dikenal dengan KTNA yang disebutnya sebagai 'kelompok tani negeri', sedangkan Sri Cendana dinilainya bukan kelompok tani resmi. Dia menyebutnya sebagai 'kelompok tani swasta'. Hal itu terutama berkaitan dengan keterlibatan kelompok tani Sri Cendana pada jejaring IPPHTI. Karena pembentukan IPPHTI tidak dilakukan secara resmi oleh pemerintah sebagaimana KTNA, petani KTNA tersebut mengategorikan IPPHTI juga sebagai kelompok tani swasta.

Respon yang muncul tersebut menunjukkan adanya proses *othering* yang muncul sebagai reaksi dari kelompok tani lain yang menganggap bahwa keterlibatan kelompok tani Sri Cendana pada IPPHTI tidak merupakan sesuatu yang resmi. Di sini IPPHTI sebagai *the self* mengalami penguatan identitas ketika bertemu dengan kelompok KTNA yang menyebut IPPHTI sebagai 'kelompok tani swasta', sebagai perbandingan dengan KTNA yang menyebut diri sebagai 'kelompok tani negeri'.

-oo0oo-

Proses menguatnya identitas sebagai petani *Bisa Dèwèk* terbangun seiring dengan tumbuhnya kesadaran di kalangan petani tentang pentingnya kemandirian. Sikap untuk menjadi petani yang '*Bisa Dèwèk*' selalu ditekankan dalam setiap pemutaran film di sebelas kecamatan (*ngamèn*). Dalam hal ini, nilai-nilai *Bisa Dèwèk*' sebagai sinonim dari nilai-nilai kemandirian senantiasa dibangun dan dijadikan sebagai sesuatu yang dimiliki bersama oleh anggota IPPHTI Kabupaten Indramayu, atau menjadi "*one of the thing that people have in common*" (Jenkins, 2008). Proses penguatan identitas sebagai petani IPPHTI juga berlangsung dengan menciptakan rasa kepemilikan bersama (*shared belonging*) terhadap IPPHTI. IPPHTI merupakan organisasi yang dalam persepsi petani bergumul dengan ilmu pengetahuan tentang praktik pertanian alih-alih kelompok tani yang lain. Dengan inilah mereka membuat sebuah proses pembedaan (*othering*) antara IPPHTI dan bukan IPPHTI.

BAB IV PROSES MEREPOSISI DIRI

Bab ini akan memperlihatkan adanya proses mereposisi diri (*repositioning*) yang dilakukan oleh para petani yang tergabung di jejaring IPPHTI dalam interaksinya dengan berbagai pihak selama menjalankan strategi untuk memperoleh pengakuan dan dukungan pemerintah atas aktivitas pemuliaan tanaman. Jenkins (2008) mengatakan bahwa proses penting dalam penegasan identitas adalah adanya suatu proses pengklasifikasian (*classification*). Untuk melakukan proses klasifikasi tersebut terdapat dua unsur penting yang ditentukan yaitu 'posisi' dan 'kategori'. Bagaimanakah petani merefleksikan diri mereka dalam menentukan 'posisi' mereka di tengah-tengah konstelasi relasi yang berjalan selama berlangsungnya program *Bisa Dèwèk* sebagai sarana mereka untuk berstrategi?

Dalam tahap ini, identitas IPPHTI telah kuat dan dijadikan representasi *the self* dalam menghadapi *the others*. Jenkins (2008:45) mengatakan bahwa: "*The constitution and distribution of positions are the outcome of political relationships and struggles, within and without organisations...*". IPPHTI berjuang agar posisinya dalam konstelasi relasi di dunia pertanian tidak lagi sub-ordinat terhadap pihak-pihak lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Marcus (1998) yang berpendapat bahwa kemunculan identitas merupakan hasil dari gabungan elemen-elemen seperti 'resistensi' dan 'akomodasi' dari sistem di sekitarnya. Dikatakan Markus (1998:61) bahwa: "*Local identities emerges as a compromise between a mix of elements of resistance to incorporation into a larger whole and of elements of accomodation to this larger order.*" Dalam kaitannya dengan negosiasi dalam menentukan posisi petani di hadapan pemerintah dalam program *Bisa Dèwèk* ini, masih ada tujuan akhir yang ingin dicapai. Dalam proses mencapai tujuan akhir itu, yakni untuk memperoleh pengakuan dan dukungan pemerintah atas aktivitas serta kreativitas mereka melakukan pemuliaan tanaman, IPPHTI mengaktualisasikan dirinya melalui refleksi untuk memperkuat posisi.

Setelah kesadaran identitas itu muncul dan diperkuat sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, bab ini akan memaparkan proses yang dilakukan oleh para petani IPPHTI dalam melakukan refleksi tentang posisi

mereka dalam relasi yang berlangsung selama program *Bisa Dèwèk* berjalan (Jenkins, 2008). Hasil refleksi mereka tersebut dijadikan landasan untuk melakukan interaksi dengan *the others* sebagai strategi untuk mencapai tujuan.

Kerbau dan Harimau: Kita Petani yang Mana?

Dalam sub bab ini akan dijelaskan proses refleksi IPPHTI dalam melihat posisi mereka pada setiap hubungan relasional dengan pihak-pihak lain. Metafora Kerbau dan Harimau dipakai untuk mendefinisikan bentuk relasional kerja sama IPPHTI dengan pihak lain. Metafora ini muncul sebagai bentuk protes bentuk kerja sama yang mereka lakukan dengan pihak lain.

Pada pertengahan bulan Juli 2007, sepulang dari Magelang (sehabis melakukan pemutaran film *Bisa Dèwèk* atas undangan petani Magelang), H. Masroni dan pak Warsiah diundang hadir ke rumah Koordinator Umum IPPHTI Nasional, T.O. Suprpto di Yogyakarta. Di situlah kemudian Triwidodo (dosen IPB) yang juga hadir menuturkan sebuah kisah tentang hubungan antara kerbau dan harimau. Kisah ini dipakai untuk merepresentasikan hubungan petani sebagai 'sang kerbau' dengan pihak-pihak lain yang berkuasa sebagai 'sang harimau'. Dalam kesempatan itu Triwidodo mengajukan pertanyaan yang bernada refleksif yaitu ingin menjadi 'kerbau' seperti apakah mereka?. Menjadi kerbau yang penurut dan terus-menerus tunduk pada kekuasaan 'sang harimau', ataukah menjadi 'kerbau' yang mempunyai sikap, berani bertindak, dan mengakhiri relasi yang tidak adil?

Proses refleksi yang dilakukan oleh para petani menunjukkan adanya kesadaran yang mulai tumbuh tentang posisi mereka. Untuk menjelaskan proses relasional yang telah mereka jalankan dengan pihak lain, H. Masroni, koordinator tim *Bisa Dèwèk*, membawa cerita ini kepada para petani IPPHTI Indramayu dan mengutarakannya dalam satu kesempatan pertemuan (rapat persiapan seminar kabupaten, pertengahan Juli 2007) di rumah pak Warsiah di Desa Kalensari. Yang hadir dalam pertemuan ini adalah petani IPPHTI yang menjadi panitia persiapan untuk merencanakan penyelenggaraan seminar tingkat kabupaten. H. Masroni mengajukan pertanyaan refleksif sebagaimana yang telah dilakukan oleh

Triwidodo pada petani-petani IPPHTI di Indramayu: akan menjadi ‘kerbau’ seperti apakah mereka? Narasi cerita fabel ini adalah sebagai berikut¹:

Cerita fabel ini mengisahkan tentang hubungan yang terjalin antara sepasang kerbau dan seekor harimau yang selamat dari bencana kebakaran yang menghancurkan segalanya. Akibat bencana tersebut alam menjadi rusak dan tidak ada lagi sumber makanan bagi kerbau maupun harimau. Namun pada suatu ketika harimau mengatakan kepada sepasang kerbau bahwa dia telah melihat satu petak tanah yang ditumbuhi rumput. Karena harimau tidak memakan rumput, maka dia menawarkan bantuan pada sepasang kerbau untuk mengantarkan mereka ke daerah rumput yang dimaksud. Namun karena kondisi kedua kerbau yang sangat lemah, mereka tidak dapat berjalan. Di sinilah kemudian sang harimau menawarkan jasanya untuk menggondong kedua kerbau tersebut sapa tempat penuh rumput. Karena merasa berhutang budi dan terkesan oleh kebaikan sang harimau, kerbau tersebut menawarkan dirinya untuk dimakan oleh harimau yang juga terlihat kurus dan membutuhkan makanan. Namun harimau merasa tidak selera dengan sepasang kerbau yang masih kurus tersebut dan memilih untuk membuat rencana lain yang lebih menguntungkan. Harimau mengatakan pada para kerbau bahwa dia tidak akan memakan mereka, hanya saja nanti setiap satu dari sepuluh anak yang mereka lahirkan harus diserahkan kepadanya untuk dimakan. Dengan demikian dia merasa bahwa dia tidak akan kehabisan makanan. Demikianlah perjanjian antara kerbau dan harimau tersebut disepakati sampai jangka waktu yang lama sehingga populasi harimau dan kerbau semakin bertambah. Hal ini berlangsung berabad-abad sampai akhirnya jumlah populasi kerbau dan harimau sama banyak. Untuk menurunkan sepuluh keturunan, kerbau membutuhkan waktu empat sampai lima tahun. Pada setiap anak yang dilahirkan, mereka selalu bercerita tentang hutang budi kepada harimau. Demikian juga harimau yang selalu bercerita pada anak-anaknya tentang hak mereka pada kerbau. Karena populasi harimau dan kerbau yang sama banyak, akhirnya membuat rentang waktu penyerahan menjadi semakin sempit. Dari lima tahun menjadi empat tahun, dari empat tahun menjadi setahun, sebulan, seminggu, dan akhirnya setiap detik kerbau harus menyerahkan anaknya pada harimau. Kisah ini selanjutnya diakhiri dengan suatu pertanyaan yang bernada refleksif tentang perjanjian yang telah dibuat antara kerbau dan harimau: adilkah perjanjian tersebut? Haruskah mereka menerima begitu saja hasil perjanjian tersebut, dan atautkah generasi penerus kerbau harus berbuat sesuatu?

¹Cerita ini berasal dari kisah Mbah Grenjeng (Ki Mangundikromo), cikal bakal Desa Tulungrejo, Tulung Agung, di awal abad ke-19. Kisah itu disadur dan diceritakan ulang oleh Hermanu Triwidodo dan dinarasikan oleh Tia Ayu Puspitarini dengan judul: “Kisah Asal-Muasal Kegundahan Generasi Penerus Kerbau” (lihat juga Prosiding Seminar-Lokakarya API-UGM, 2008).

Proses refleksi ini berlangsung pada saat para petani IPPHTI Kabupaten Indramayu sedang bergiat untuk memperjuangkan pengakuan serta dukungan pemerintah atas kreativitas mereka dalam melakukan praktik pemuliaan tanaman. Pelaksanaan program *Bisa Dèwèk* telah memasuki tahap persiapan perencanaan seminar di kabupaten yang itu berarti bahwa petani akan menghadapi pihak yang mempunyai status lebih tinggi dalam konstelasi hubungan di dunia pertanian. Refleksi tentang status mereka ini dimungkinkan dengan adanya berbagai pengalaman yang mereka terima saat melakukan relasi dengan pihak lain dalam program yang berlainan, seperti yang mereka alami dalam pelaksanaan program PEDIGREA dan program *Bisa Dèwèk*.

Dalam pelaksanaan suatu program kerja sama dengan pihak lain, petani (kerbau) acapkali hanya dijadikan objek tanpa dilibatkan lebih jauh dalam perencanaan suatu program. Pelaksanaan program yang bersifat *top-down* hanya menempatkan petani sebagai pelaksana dan tidak memberi ruang bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam mengelola, mengawasi, dan merancang strategi untuk menciptakan hasil yang terbaik bagi petani. Hal itu yang memunculkan kesadaran pada diri petani (kerbau) tentang adanya unsur ketidakadilan dan menjurus pada suatu relasi yang bersifat eksploitatif terkait hubungan mereka dengan penyelenggara program (harimau). Proses refleksi petani dengan membandingkan kenyataan yang terjadi pada mereka dengan cerita fabel tersebut memunculkan reaksi dan sikap kritis tentang bagaimana sebuah relasi dalam suatu program dibuat. Mereka menginginkan hubungan yang bersifat sejajar dan tidak merugikan.

Kegundahan para petani IPPHTI terkait relasi yang tidak adil dalam format kerja sama suatu program juga dipicu oleh ketidaktahuan sebagian besar petani IPPHTI tentang detail isi kerja sama yang dilakukan. Rosyidi (2008) mengungkapkan bahwa para 'kerbau' tidak mengetahui secara detail sejarah program kerja sama dimulai. Menurutnya, banyak petani IPPHTI yang 'ahistoris' atau tidak mengetahui sejarah dan detail isi dari kerja sama suatu program (Rosyidi, 2008:45). Menurut hemat saya, ketidaktahuan sebagian besar petani tentang sejarah, detail kesepakatan kerja sama, dan posisi serta hak dan kewajiban antara IPPHTI dengan Yayasan FIELD Indonesia dalam program

pemuliaan tanaman lebih banyak disebabkan oleh faktor lemahnya koordinasi internal organisasi. Selain itu, tidak jarang keterlibatan pengurus IPPHTI dalam program pemuliaan tanaman hanya sebatas sebagai perorangan dan tidak merepresentasikan dirinya sebagai pengurus IPPHTI. Selain itu, keterlibatan wakil-wakil kelompok tani yang sebelumnya tidak terlibat dalam kepemimpinan IPPHTI dalam kancah program pemuliaan tanaman membuat pemikiran petani untuk menuntut haknya menjadi lebih kritis. Hal itu didukung dengan adanya program *Bisa Dèwèk* yang memberi ruang pada keterlibatan secara aktif bagi petani untuk bersama-sama merencanakan, menjalankan, dan membuat evaluasi terhadap jalannya program.

‘Para kerbau’ kini berefleksi diri tentang apa yang sedang terjadi, dan bagaimana yang sebaiknya terjadi terkait hubungan relasional dengan pihak lain dalam pelaksanaan sebuah program. Seperti misalnya yang terjadi ketika program *Bisa Dèwèk* tengah berlangsung, petani-petani menolahkan rencana program SPL (Sistim Pangan Lokal) yang akan digagas oleh Yayasan FIELD Indonesia. Alasan penolakan ini karena program yang akan dilaksanakan tersebut tidak melibatkan IPPHTI dalam perencanaannya. IPPHTI menginginkan adanya pelibatan secara aktif dalam program yang sedang digagas tersebut. Disitu kemudian terjadi suatu negosiasi tentang posisi dan peran yang akan dijalankan. Kondisi ketidakadilan dan ketidaksetaraan posisi dalam pelaksanaan sebuah program segera diakhiri dan diubah dengan hubungan yang setara dan saling menguntungkan, jauh dari unsur-unsur eksploitasi. Lebih jauh lagi, petani kemudian melakukan refleksi tentang bagaimana seharusnya mereka menjadi ‘kerbau yang merdeka’.

Kita adalah ‘Kerbau yang Merdeka’

Proses refleksi yang dilakukan tersebut telah memunculkan kesadaran di kalangan petani IPPHTI bahwa mereka harus berubah karena mereka tidak ingin terus-menerus hanya dijadikan objek dalam sebuah pelaksanaan program. Realitas perjuangan kelompok tani yang tergabung dalam jejaring IPPHTI Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa mereka saat ini bukan lagi sebagai ‘kerbau yang penurut’ yang hanya menerima saja kemauan dari ‘sang harimau’ (penguasa, atau penyelenggara program) dari pihak luar. Saat ini mereka telah berani mempertanyakan posisi dan untung rugi dari adanya relasi yang dibuat dengan

‘sang harimau’ termasuk mengenai status dan peran mereka, sejauh mana keterlibatan mereka, serta apa yang akan dihasilkan dari suatu kerja sama relasional yang dilakukan atau yang akan digagas.

Ketika proses refleksi berjalan, saat itu sebenarnya mulai terbangun suatu kesadaran di kalangan petani IPPHTI tentang posisi mereka dalam kerja sama pelaksanaan suatu program yang melibatkan petani. Program PEDIGREA yang selama ini dilaksanakan oleh Yayasan FIELD Indonesia dan juga melibatkan pihak pemerintah, mendapat sorotan dan penilaian terutama mengenai keterlibatan para petani dan status dan peran yang mereka jalankan. Dalam hal ini, pemerintah dan Yayasan FIELD Indonesia dipandang sebagai ‘harimau’ yang memiliki kewenangan lebih tinggi, sedangkan petani sebagai ‘kerbau’ yang menempati posisi di bawah. Ada hal menarik ketika cerita tentang kerbau dan harimau ini dikemukakan oleh H. Masroni pada petani. Petani-petani tersebut merupakan perwakilan kelompok yang sedang melakukan persiapan seminar kabupaten. Ketika ditanya mengenai peran mereka, apakah saat ini mereka sedang berperan sebagai ‘sang kerbau’ ataukah ‘sang harimau’, pendapat beragam muncul di kalangan petani, ada yang mengira mereka cocok sebagai ‘harimau’ dan ada yang sadar kalau mereka saat ini sedang memerankan posisi sebagai ‘sang harimau’. Akhirnya setelah mendapat penjelasan cerita lebih lanjut oleh H. Masroni, petani-petani tersebut sadar bahwa mereka adalah ‘sang kerbau’. Sekalipun ada upaya untuk berubah tidak sekedar sebagai ‘kerbau yang penurut’, dalam relasi hubungan di dunia pertanian, yang menjadi ‘harimau’ adalah tetap para pemerintah yang berwenang, baik dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Dalam konstelasi hubungan kekuasaan tersebut, mereka bukanlah sang ‘harimau’ (lihat Winarto, 2007). Tetapi kesadaran yang muncul di kalangan petani adalah bahwa mereka merupakan ‘kerbau yang merdeka’ dengan posisi dan daya tawar yang lebih tinggi (lihat laporan tim *Bisa Dèwèk*).

‘Calo dan Germo’

‘Calo’ dan ‘Germo’ adalah metafora lain yang digunakan oleh para petani untuk mendefinisikan variasi bentuk-bentuk hubungan yang terjadi antara petani dan pihak lain dalam suatu program yang melibatkan mereka. Metafora ini muncul

atas refleksi mereka dalam menilai suatu kerja sama dengan pihak lain (mitra) sebagai perbandingan yang muncul dari karakteristik sebuah kerja sama.

Refleksi tentang 'calo' dan 'germo' merupakan cara petani untuk mendefinisikan pihak-pihak penyelenggara program. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan FIELD Indonesia, lembaga pendidikan seperti Universitas Indonesia (UI), sampai Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu merupakan mitra-mitra petani yang dimaksudkan di sini. Pihak-pihak inilah yang mengadakan kerja sama dengan para petani yang tergabung dalam jejaring IPPHTI beberapa tahun terakhir. Relasi yang terbangun kemudian diberi penilaian terutama terkait cara pihak-pihak luar tersebut menempatkan mereka. Di sinilah digunakan kata 'calo' yang merujuk pada arti yaitu seorang yang mencarikan angkot (angkutan kota) bagi penumpang yang membutuhkannya, lalu mendapatkan imbalan untuk jasa tersebut. Sementara itu 'germo' digunakan sebagai perumpamaan yang mengandung pengertian sebagai seseorang yang mengayomi dan melindungi anak asuhnya untuk kemudian menjualnya demi memperoleh keuntungan.

Kata 'germo' sebagaimana lazimnya yang diterima masyarakat, mengandung konotasi negatif sebagai orang yang mengambil keuntungan dari aktivitas 'menjual' baik dirinya maupun orang lain. Dalam konteks hubungan antara petani dan penyelenggara program, 'germo' dipakai untuk merujuk pada pihak yang mengambil keuntungan dari petani dengan cara 'menjual' mereka pada pihak donatur. Dalam setiap relasi atau kerja sama untuk menjalankan sebuah program yang melibatkan petani, siapa pun dapat menjadi 'germo' atau 'calo', tergantung dari peran yang dijalankan. 'Calo' digunakan untuk menunjuk pihak yang menjadi perantara antara pemberi dana (donatur) dengan petani yang membutuhkannya untuk menjalankan sebuah program.

Isu ini berkaitan dengan permasalahan di seputar persoalan "cari makan." Ada pihak yang hidup dari "menjual" petani sehingga petani hanya menjadi objek untuk menghidupi mereka sendiri. Pihak-pihak ini antara lain yaitu kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti Yayasan FIELD Indonesia dan lain-lain. Pihak semacam ini diistilahkan sebagai "germo." Hal ini terungkap misalnya dari pernyataan-pernyataan yang diutarakan oleh pak Warsiah tentang kekecewaannya

terhadap Yayasan FIELD Indonesia. Menurutnya, apa yang terjadi terkait pembagian hak dan kewajiban selama berlangsungnya program PEDIGREA tidak merepresentasikan relasi yang adil. Pak Warsiah menyebutkan bahwa gaji yang diterima oleh staf-staf Yayasan FIELD Indonesia sangat tinggi menurut ukurannya, sementara petani hanya mendapatkan jumlah yang sedikit. Kasus ini berbeda dengan pihak yang kehidupannya tidak tergantung dari “menjual” petani seperti misalnya UI bisa “cari makan” sendiri terlepas dari membantu petani atau tidak. Pihak yang menjalankan peran seperti ini diistilahkan sebagai “calo” atau perantara. Bahkan dalam program *Bisa Dèwèk* yang dilaksanakan antara UI dan petani, kedua belah pihak terlibat bersama-sama dalam merancang dan mengalokasikan anggaran pendanaan.

Adanya keterlibatan para petani dalam menyusun rencana kegiatan, membuat evaluasi tentang apa yang telah dicapai dan kekurangan yang ada dalam pelaksanaan program, membuat petani-petani tersebut belajar banyak dan menyerap pengetahuan tentang bagaimana mengorganisasikan program. Bukan itu saja, adanya pembelajaran dari program *Bisa Dèwèk* membawa mereka merefleksikan diri mereka dan membuat perbandingan dengan program, dan pihak-pihak lain sebagai mitra mereka.

Mendekati ‘Memedi Sawah’: Alat Legitimasi Posisi IPPHTI

Melalui serangkaian refleksi yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, petani IPPHTI sadar bahwa posisi mereka tetap sebagai pihak yang menempati hirarki paling bawah dalam struktur kekuasaan, mereka tetaplah ‘sang kerbau’. Sementara itu, yang memegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi adalah pemerintah, para pejabat yang berwenang, serta mereka yang menjadi perantara (calo) dalam relasi mereka dengan pihak donor adalah para pendamping dari lembaga nonpemerintah. Di sisi lain, terdapat para akademisi dari dunia pendidikan yang memiliki legitimasi di bidang ilmu pengetahuan. Adanya penilaian melalui refleksi yang dilakukan, mendorong para petani IPPHTI untuk meminta bantuan pihak akademisi agar membantu aktivitas mereka untuk mendekati pihak pemerintah. Hal ini dilakukan karena menurut mereka para akademisi dan universitas merupakan pihak yang netral dan selain itu memiliki

legitimasi dan daya tawar di hadapan pemerintah. Dalam istilah yang dimunculkan oleh Triwidodo dalam sebuah seminar di UGM (Universitas Gajah Mada) dan yang kemudian digunakan oleh petani Indramayu, para akademisi ini disebut dengan istilah '*memedi sawah*' yang dalam artian harfiah merupakan alat untuk menakut-nakuti burung di sawah. Apakah ini juga mengandung pengetahuan bahwa pihak akademisi berperan sebagai alat untuk 'menakut-nakuti' pemerintah?

Hubungan IPPHTI dengan pihak universitas di Kabupaten Indramayu diawali oleh adanya pertemuan antara H. Masroni dengan dekan Universitas Wiralodra, pak Asep di sebuah rental komputer di Indramayu. Pertemuan tersebut membicarakan topik-topik pertanian dan persoalan yang dihadapi oleh petani. Kelanjutan dari pembicaraan itu adalah diselenggarakannya seminar di Universitas Wiralodra. Dalam seminar tersebut kemudian disepakati rencana untuk membentuk suatu organisasi yang menaungi petani-petani organik. Organisasi tersebut kemudian dibentuk yaitu IKAPOIN (Ikatan Petani Organik Indramayu). Pengalaman berhubungan dengan pihak akademisi ini kemudian dijadikan acuan untuk kembali meminta dukungan mereka dalam memfasilitasi kegiatan petani, terutama dalam berhubungan dengan pihak pemerintah.

Pendekatan pada '*memedi sawah*' ini berlangsung tatkala petani IPPHTI sedang gencar-gencarnya mengusahakan untuk mendapatkan akses pada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, untuk dapat hadir dalam acara lokakarya puncak dari kegiatan program *Bisa Dèwèk*. Pada tanggal 23 Juni 2007 tim *Bisa Dèwèk* melakukan audiensi pada pihak Universitas Wiralodra dan sekaligus melakukan pemutaran film *Bisa Dèwèk*. Dalam pertemuan itu diharapkan pihak universitas dapat mendukung kegiatan yang sedang dilakukan oleh petani dan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang strategi yang sebaiknya ditempuh untuk mendekati pemerintah daerah. Dalam dialog yang dilakukan antara akademisi Universitas Wiralodra dan perwakilan petani IPPHTI, petani memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh petani. H. Masroni memberikan keterangan sebagai berikut:

“seminar di kabupaten yang direncanakan akhir Juli dan paling lambat awal Agustus dan rencananya akan mengundang para ahli, para peneliti, instansi terkait, IPB, UGM, yang *output*-nya adalah kalau memang kegiatan kami

dianggap perlu oleh masyarakat, inginnya kegiatan kami dianggarkan di APBD tetapi kami buta hukum / Birokrasi / caranya bagaimana. Harapannya mohon dukungan dari semua pihak untuk bisa bekerjasama membela kegiatan petani yang tergabung dalam IPPHTI, dan bagaimana caranya mendatangkan bupati dalam acara seminar nanti...”

Dialog yang dilakukan antara petani dan pihak akademisi ini menunjukkan adanya usaha dari para petani untuk menghilangkan jarak antara petani dan ‘orang kampus’ yang selama ini terentang. Petani mulai sadar bahwa untuk memperjuangkan keinginannya mereka harus menjadikan pihak akademisi sebagai mitra mereka yang sejajar untuk dimintai bantuannya. Rupanya petani telah melakukan identifikasi terkait dengan kategori, posisi mereka, dan kemudian melakukan usaha untuk ‘mereposisi’ status mereka di hadapan *the others*. Dalam kesempatan-kesempatan lainnya hal ini malah semakin nampak yaitu dalam fase persiapan penyelenggaraan seminar yang melibatkan Universitas Wiralodra dalam proses perencanaannya. Tanggapan dari para akademisi di Universitas Wiralodra terhadap kegiatan yang dilakukan petani menunjukkan adanya dukungan dan mereka berjanji akan membantu petani, seperti tampak dalam pernyataan Dekan Fakultas Pertanian dalam pertemuan di Universitas Wiralodra:

“...Petani tidak ada yang memfasilitasi oleh karena itu kami ingin menjadikan Unwir sebagai tempat bertanya masyarakat Indramayu. Di sini juga kami melihat potensi yang sangat besar dari petani dan dibutuhkan mediator...”

Dukungan juga dinyatakan oleh Pembantu Rektor I (Purek I) Universitas Wiralodra terhadap aktivitas yang sedang dilakukan oleh para petani. Dia kemudian menambahkan bahwa pihak pemerintah dapat dimintai dukungannya juga jika tujuan dari kegiatan ini jelas. Dia mengatakan:

“...saya malu, karena Unwir yang notabennya melayani masyarakat Indramayu kalah satu langkah dengan para petani . Sebenarnya kalau bupati itu tidak sulit asalkan tujuan dari program tersebut jelas dan nyata. Dan kami cukup bangga bisa *sharing* dengan bapak-bapak seharusnya yang mengetahui kegiatan yang ada di IPPHTI Kab. Indramayu itu jangan UGM dulu ...”

Terjadi dialog yang intensif antara pihak Universitas Wiralodra yang diwakili oleh Wakil Rektor I dan Dekan Fakultas Pertanian dengan perwakilan tim *Bisa Dèwèk* yang terdiri dari petani (diwakili oleh beberapa petani seperti H. Masroni, Warsiah, Nurkilah, dll) dan tim UI (diwakili oleh Yunita T. Winarto dan Rhino Ariefiansyah). Seusai pemutaran film di salah satu ruang rapat universitas yang dihadiri juga oleh para mahasiswa, mereka menuju ke satu ruangan terpisah yaitu ruang rektorat untuk berunding dan membicarakan strategi yang akan ditempuh dalam mendekati pihak pemerintah (bupati). Dalam pembicaraan itu disepakati suatu strategi yang akan dijalankan dalam upaya mendekati pemerintah, yaitu pihak Universitas Wiralodra berjanji akan terlibat dalam usaha 'melobi' pemerintah untuk memberikan perhatian serta dukungan terhadap apa yang sedang dilakukan oleh petani dan akan meminta waktu untuk bertemu dengan bupati. Untuk itu, disepakati disusun konsep bersama yang akan diserahkan ke bupati sebelum pertemuan dilakukan. Keantusiasan pihak UNWIR untuk membantu mengusahakan akses pada pemerintah ditunjukkan dengan hadirnya Dekan Fakultas Pertanian yaitu pak Asep ke Kalensari pada sore hari selepas pemutaran di kampusnya untuk menggagas konsep itu. Dia datang bersama ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNWIR, Wartono, dengan mengendarai sepeda motor dan langsung terlibat diskusi dengan para petani untuk membuat perencanaan terkait strategi untuk mendekati pemerintah daerah. Dalam proses perencanaan penyelenggaraan seminar tingkat kabupaten yang sedang digagas, disepakati pembagian tugas sebagai berikut:

- Tim IPPHTI Indramayu dan tim UI (yaitu tim *Bisa Dèwèk*) akan menyusun konsep yang diserahkan pada UNWIR guna diteruskan pada Bupati.
- Dengan konsep itu UNWIR akan menghubungi Bupati untuk meminta waktu dapat melakukan audiensi.
- Dalam kesempatan audiensi itu nanti akan diutarakan maksud dan harapan petani atas dukungan Pemda tentang kegiatan-kegiatan mereka dan undangan bagi bupati untuk menghadiri seminar.
- Mengingat waktu yang telah mendesak, diharapkan agar audiensi dapat dilaksanakan sebelum tgl. 8 Juli 2007.

Sumber: Laporan Tim *Bisa Dèwèk*, 2007

Proses ini menunjukkan adanya kepercayaan diri yang tumbuh di kalangan petani untuk menegosiasikan posisi mereka dalam hirarki hubungan atau relasi yang dilakukan dengan pihak lain. Dalam hal ini, petani dengan percaya diri menempatkan pihak akademisi sebagai mitra mereka. Dalam kesempatan ini, pada pihak akademisi ditegaskan tentang orientasi petani. H. Masroni menegaskan bahwa petani bukan berorientasi pada materi dan keuntungan, melainkan pada penyebaran ilmu. Hal itu terkait dengan kondisi petani dalam kemandirian mereka. Misalnya, dengan aktivitas pemuliaan tanaman diharapkan paling tidak petani mampu membuat benih untuk keperluan mereka sendiri. Paling tidak petani dapat melakukan seleksi jika tidak melakukan pemuliaan. Di sini kembali ditekankan bahwa apa pun yang dilakukan petani, perlu ada kesamaan persepsi dengan pemerintah. Berkenaan dengan benih, tentunya diperlukan proses sertifikasi. Pihak pemerintah perlu diyakinkan, terutama pada bupati, bahwa kegiatan pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh para petani nantinya akan mendatangkan dampak positif, khususnya pada Kabupaten Indramayu dengan tercukupinya kebutuhan benih di tingkat lokal. Selain itu Dekan Fakultas Pertanian (pak Asep) juga mempertanyakan konsep tentang kemandirian yang diusung oleh petani. Menurutnya, petani tidak mungkin hidup dengan sama sekali tidak tergantung pada pihak lain. Karena itu yang lebih tepat adalah konsep kemitraan dan bukan kemandirian.

Demikianlah strategi yang dijalankan oleh para petani IPPHTI dalam menguatkan legitimasi mereka di depan pemerintah, dengan cara mendekati pihak universitas (akademisi) untuk membantu dan sekaligus memperoleh dukungan dari mereka. Pada saat menyiapkan seminar, tim UI dan IPPHTI menyusun undangan siapa saja yang diminta hadir. Pihak lain yang didekati sebagai '*memedi sawah*' antara lain adalah IPB (Institut Pertanian Bogor) yang dalam hal ini Triwidodo sudah sejak dari awal telah memperlihatkan perhatian dan kepeduliannya terhadap proses perjuangan petani di Indramayu dengan misalnya mengundang petani-petani IPPHTI Indramayu untuk mengikuti berbagai pelatihan di IPB. Triwidodo juga kerap hadir dan memberi dukungan pada setiap acara-acara atau even penting yang dibuat oleh petani. Kemudian petani juga melakukan pendekatan dan meminta legitimasi dari akademisi Universitas Gajah Mada

(UGM) dengan misalnya mengundang Prof. Kasumbogo Untung sebagai pembicara dalam seminar tingkat kabupaten. Beliau adalah ahli masalah pertanian UGM. Pihak UI diwakili oleh Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Antropologi FISIP UI sebagai penanggung jawab program *Bisa Dèwèk*. Dalam persiapan seminar tingkat kabupaten, undangan secara resmi juga ditujukan pada akademisi UI khususnya dari program sarjana antropologi. Semua itu menunjukkan usaha yang dilakukan oleh petani untuk memperoleh legitimasi para akademisi.

Tindakan petani mendekati '*memedi sawah*' yang bertujuan untuk memperoleh legitimasi dan dukungan dari kalangan akademisi untuk membantu kegiatan mereka sangat jarang ditemui di tempat lain. Kasus ini memperlihatkan kepada kita kenyataan bahwa petani mampu secara aktif melakukan dialog, negosiasi dan meminta dukungan dalam posisi sejajar dengan para akademisi.

Seminar Wiralodra: Penguatan Posisi Petani dan Pengakuan Pemerintah.

Dalam sub bab ini akan ditunjukkan proses penyiapan seminar akhir (Seminar Wiralodra) dalam serangkaian kegiatan *ngamèn* serta hasil pencapaian IPPHTI Kabupaten Indramayu dalam program *Bisa Dèwèk*. Dalam seminar/lokakarya di Universitas Wiralodra yang dihadiri oleh Wakil Bupati Indramayu, ditegaskan bahwa pemerintah akan membantu petani dalam aktivitas yang mereka lakukan. bagaimanakah persiapan itu dilakukan dan apa hasil yang mereka peroleh dari kegiatan tersebut?

Pertemuan perwakilan seluruh kelompok basis IPPHTI tingkat kecamatan di Desa Sukadana, tanggal 02 Juli 2007 dalam sebuah lokakarya yang juga dihadiri oleh perwakilan dari pihak donor (Kedutaan Besar Findlandia di Jakarta), dijadikan persiapan untuk menyusun strategi dan rencana pelaksanaan seminar tingkat kabupaten yang telah direncanakan akan diadakan di kampus Universitas Wiralodra. Pertemuan ini adalah hasil kerja dan persiapan yang dilakukan oleh

TPD² (Tim Penghubung Dalam) yang telah dibentuk untuk menangani persoalan-persoalan yang menyangkut dengan koordinasi ke dalam.

Dalam kesempatan pertemuan di Sukadana, masing-masing kelompok di kecamatan memperoleh tugas dan peran yang akan dilakukan dalam seminar yang akan diadakan nanti. Dalam seminar itu nanti akan diperlihatkan kepada pemerintah aktivitas-aktivitas apa saja yang telah dilakukan oleh petani-petani IPPHTI selama ini, yang menunjukkan kreativitas mereka di bidang pertanian. Dalam seminar itu nanti akan ditampilkan 'barang jualan' yang akan diperlihatkan pada pihak-pihak yang hadir terutama pemerintah daerah, yang menunjukkan kelebihan IPPHTI untuk dipromosikan, Berdasarkan hasil kesepakatan kelompok, disetujui bahwa yang akan dipresentasikan (dipromosikan) dalam seminar tingkat kabupaten di Universitas Wiralodra antara lain kegiatan:

1. Pemuliaan Tanaman
2. SRI (*Sistem Rice Intensification*)
3. OPT
4. Dokumentasi
5. Bank Benih
6. Manajemen Organisasi
7. SPL (*Sistem Pangan Lokal*)

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan aktivitas petani-petani yang tergabung dalam jejaring IPPHTI Kabupaten Indramayu yang membedakannya dengan kelompok tani lain. Kegiatan-kegiatan inilah yang akan dipromosikan pada pihak pemerintah kabupaten agar mendapat pengakuan dan kemudian dukungan agar aktivitas tersebut dapat berjalan lebih baik dan dapat memberikan manfaat secara luas. Selama ini, kegiatan yang ada tersebut tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah sehingga petani yang melakukan aktivitas tersebut merasa kesulitan. Hal itulah yang mengakibatkan pengetahuan dan aktivitas yang telah dijalankan oleh para petani tersebut belum dirasakan manfaatnya secara luas. Dalam upaya untuk mempromosikan aktivitas-aktivitas dan potensi yang ada dalam setiap kelompok, kegiatan-kegiatan yang ada tersebut dipresentasikan oleh para petani setelah sebelumnya mereka melakukan latihan

² TPD merupakan tim yang dibentuk untuk mengurus dan mempersiapkan keperluan yang menyangkut koordinasi internal dalam mempersiapkan seminar di kabupaten. Tim ini terdiri dari petani-petani IPPHTI dan Tim UI. Selain itu juga ada tim lain yaitu Tim Penghubung Luar (TPL).

dan simulasi berulang kali agar penampilan mereka nanti dapat maksimal. Setelah disepakati siapa-siapa yang bertanggung jawab mempresentasikannya, petani-petani tersebut berulang kali berlatih di rumah pak Warsiah.

Seminar tingkat kabupaten (atau disebut juga seminar Wiralodra) yang disiapkan oleh Tim Penghubung Luar (TPL)³ merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan dalam program *Bisa Dèwèk*, setelah proses pembuatan film, pendiseminasian film ke kelompok-kelompok di sebelas kecamatan, dan meminta dukungan pemerintah di tingkat kecamatan. Kini tiba saatnya untuk mendapatkan pengakuan serta dukungan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan lebih tinggi di daerah. Lebih jauh lagi dukungan pemerintah ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tanggal 30 Agustus 2007 bertempat di aula “Nyi Endang Dharma Ayu” kampus Universitas Wiralodra, Kota Indramayu, dilaksanakan seminar petani yang berjudul: “*Bisa Dèwèk* dan Sains Petani: Benih-Benih Pertanian yang Tangguh”. Sebagaimana telah dikatakan di atas seminar ini merupakan puncak kegiatan dari rangkaian kegiatan selama berlangsungnya program *Bisa Dèwèk*. Seminar ini penting karena menjadi ajang bagi para petani IPPHTI Kabupaten Indramayu untuk menunjukkan eksistensi, aktivitas, serta kreativitas mereka selama ini.

Seminar ini dihadiri oleh wakil bupati Kabupaten Indramayu. Bupati sendiri tidak dapat hadir karena sedang menghadiri kegiatan lain yang menurut keterangan wakil bupati telah dijadwalkan sebelumnya dan tidak dapat ditinggalkan⁴. Dia menambahkan bahwa sebenarnya bupati sangat tertarik dan ingin sekali datang pada acara seminar petani ini. Kepala Dinas Pertanian

³ TPL merupakan tim yang dibentuk dan beranggotakan tim IPPHTI dan tim UI untuk menyiapkan dan bertanggung jawab terhadap persoalan yang berkaitan dengan pihak-pihak lain (luar) untuk dalam strategi pelaksanaan seminar kabupaten.

⁴ Petani IPPHTI telah mengirimkan undangan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Indramayu. Menurut pak Muadib yang membawa surat undangan itu langsung ke kantor bupati, surat tersebut diterima oleh bagian umum dan dikatakan bahwa surat itu akan diserahkan pada sekretaris bupati. Beberapa hari selanjutnya ketika petani mengonfirmasi keberadaan surat di kabupaten, pihak kabupaten menyatakan bahwa surat tersebut sudah berada di sekretaris bupati. Koordinasi akan dilakukan oleh sekretaris bupati perihal jadwal dan bisa-tidaknya bupati hadir dalam seminar wiralodra. Berdasarkan keterangan selanjutnya dikemukakan bahwa bupati tidak bisa hadir karena bertepatan dengan agendanya di tempat lain, dan kehadirannya di seminar wiralodra akan diwakilkan pada Wakil Bupati Indramayu.

Kabupaten Indramayu juga hadir dalam seminar ini beserta seluruh jajaran KCD (Kepala Cabang Dinas) tingkat kecamatan. Menurut keterangan H. Masroni, seluruh jajaran KCD dan PPL se-Indramayu diwajibkan untuk datang oleh Distan Kabupaten Indramayu untuk menghadiri seminar ini. Pihak lain yang hadir antara lain perwakilan dari Program Sarjana S1 Departemen Antropologi FISIP/UI yang dalam hal ini dihadiri oleh Koordinator Program Sarjana Reguler. Perwakilan dari LSM antara lain Yayasan Field Indonesia dan IGJ (International Global Justice). Perwakilan petani-petani tingkat basis IPPHTI Indramayu yang mewakili kelompok tani mereka. Beberapa perwakilan petani dari luar Indramayu juga hadir dalam acara ini. Bahkan ada petani yang jauh-jauh datang dari Jawa Timur. Selain itu seminar ini juga dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Wiralodra. Mereka dilibatkan sebagai panitia, seperti menyiapkan penerima tamu, membagikan konsumsi, dan aktivitas pendukung seminar lainnya. Seluruh tim *Bisa Dèwèk* yang terlibat dalam pelaksanaan program hadir dalam acara ini untuk bersama petani menyukseskan acara.

Dalam seminar ini petani IPPHTI melakukan pemutaran film *Bisa Dèwèk* dan dilanjutkan dengan presentasi tentang aktivitas-aktivitas mereka. Presentasi ini mereka lakukan dengan melakukan simulasi percakapan (tanya jawab) seputar kegiatan yang dilakukan oleh para petani yang tergabung dalam jejaring IPPHTI. Pagi hari sebelum acara pembukaan dimulai beberapa orang dari Pemda Kabupaten Indramayu telah datang untuk memantau kesiapan pelaksanaan seminar. Mereka sibuk menanyakan segala hal terkait dengan acara pembukaan seminar. Ini merupakan bagian dari kegiatan potokoler apabila ada pejabat daerah yang datang. Mereka mengambil alih tugas *master of ceremony* yang sedianya dilakukan oleh pak Baman dari IPPHTI.

Pada acara pembukaan H. Masroni selaku koordinator tim *Bisa Dèwèk* mengawali seminar dengan mengungkapkan orientasi dari kegiatan IPPHTI yang bermuara pada adanya usaha untuk menciptakan kemandirian petani. Dia menyayangkan adanya pengabaian akan potensi yang dimiliki oleh petani selama ini dalam kebijakan yang dibuat pemerintah. Menurutnya:

“Petani itu hanya menjadi objek pertanian selama revolusi hijau yang hanya pada peningkatan hasil panen dan mengabaikan potensi dan kreativitas yang dimiliki petani, sayangnya hal itu masih berlangsung hingga saat ini..”

H. Masroni menyesalkan terdapatnya kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pertanian yang hanya menciptakan ketergantungan bagi petani semisal adanya benih hibrida yang setiap kali musim tanam petani harus membeli dengan harga yang mahal, atau petani menjadi seolah hilang akal bila terjadi kelangkaan pupuk dikarenakan tidak ada alternatif pupuk yang dapat diusahakan oleh petani. Hal itulah yang mendorong IPPHTI – melalui program *Bisa Dèwèk* – menyebarkan pengetahuan tentang pemuliaan tanaman dan kemampuan-kemampuan lainnya di bidang pertanian kepada seluruh petani. Uraian ini diakhiri dengan pernyataan bahwa selama ini ternyata terdapat kreativitas yang ada di kalangan petani yang berpotensi untuk dikembangkan, dan dimiliki oleh para petani yang tergabung dalam jejaring IPPHTI Kabupaten Indramayu. Ujarnya:

“...di sisi lain sejumlah petani Indramayu ternyata memiliki potensi dan kreativitas dalam menjalankan budaya pertanian yang tangguh, hemat tanpa mengurangi hasil produksi melalui berbagai kegiatan di antaranya kegiatan-kegiatan kami IPPHTI Indramayu, pengendalian hama penggerek batang putih tanpa bahan kimia, memproduksi pupuk, bahan pengurai dan ramuan pestisida non kimia, budi daya tanaman dengan sistem akar sekar atau sri, pemeliharaan tanaman padi dan sayuran termasuk pelestarian varietas lokal.”

Ini merupakan bentuk promosi yang dilakukan oleh H. Masroni mewakili petani-petani IPPHTI terhadap kegiatan yang mereka lakukan selama ini, terutama mengenai aktivitas pemuliaan tanaman. Bentuk promosi ini juga terlihat dari adanya meja-meja peraga (*stand*) yang didirikan di lokasi seminar dan memperlihatkan (*display*) berbagai jenis hasil kreasi petani IPPHTI. Di antara yang dipamerkan adalah berbagai jenis benih padi hasil persilangan, berbagai jenis pupuk dan ‘obat-obatan’ organik, sampai pada hasil kreasi petani berupa alat pembuat pupuk organik buatan petani sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan semula dari program *Bisa Dèwèk* yaitu untuk memperoleh pengakuan serta dukungan pemerintah atas aktivitas serta kreativitas mereka dalam berkreasi di dunia pertanian.

Tanggapan yang positif atas pemaparan petani dalam seminar ini ditunjukkan oleh pihak pemerintah yang hadir. Hal ini diindikasikan dengan hadirnya kepala dinas pertanian Kabupaten Indramayu beserta jajaran dari staf pertanian tingkat kecamatan, yang lebih menguatkan hal itu adalah kehadiran orang yang mempunyai kewenangan paling tinggi di pemerintahan. Ketidakhadiran bupati dalam acara ini tidak dilihat sebagai kegagalan karena wakil bupati dianggap sudah merepresentasikan kewenangan pemerintahan tertinggi di tingkat kabupaten. Dalam sambutan sekaligus membuka acara seminar, wakil bupati menyatakan bahwa tujuan para petani untuk mandiri merupakan sesuatu yang mulia dan dia menyampaikan apresiasi atas keinginan para petani untuk terlepas dari ketergantungan terhadap pihak lain. Dia mengaitkan ini dengan suasana penyelenggaraan negara yang menurutnya juga sudah berubah dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik dengan menyebut undang-undang nomor 22 tahun 2004. Lebih lanjut wakil bupati mengatakan bahwa tujuan akhir dari adanya otonomi daerah adalah kemandirian. Dikatakannya:

“...kita sekarang ada perubahan UU 2 kali, 22 th 1999 sekarang 22 th 2004 sudah mandiri sekarang dan otonomi daerah. Oke hadirin sekalian, ciri-ciri paradigma desentralistik, kita sudah memasuki tahap pemberdayaan ekonomi daerah sebetulnya tujuan akhir otonomi daerah adalah kemandirian em.. seiring dengan nafas otonomi daerah...”

Nampaknya wakil bupati ingin menyampaikan kepada para petani dan semua pihak yang hadir dalam seminar bahwa aktivitas petani dan kreativitas mereka selama ini untuk mandiri sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Beliau mengaitkan ini dengan visi dan misi dari Kabupaten Indramayu yang juga hendak menciptakan masyarakat yang mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini menurutnya dapat dilakukan dengan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mendukung rencana kemandirian yang ingin diraih oleh Kabupaten Indramayu. Sehubungan dengan itu wakil bupati menegaskan:

“Misi kabupaten Indramayu ingin mewujudkan masyarakat Indramayu yang REMAJA, yang ada kaitannya dengan nafas ekonomi, hari ini kalau kita secara visi dan misi ada kata mandiri. Mandiri di sini Bapak Ibu sekalian perlu kami

sampaikan ada saatnya punya tujuan akhir. Kita ingin pada satu ketika masyarakat Indramayu dan sumber daya baik SDM dan SDA mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indramayu. Ekstrimnya walaupun tanpa bantuan dari daerah lain, saya pikir seperti ini ada koreksi langsung dengan tema seminar hari ini, memang sepertinya sederhana, kemandirian yang kita inginkan agak cukup kronologis bahwa kita ini unsurnya dengan kualitas SDM yang ada, dengan SDA yang ada kita mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indramayu.”

Wakil bupati mengakui bahwa selama ini dalam tataran ide memang terkadang banyak pihak mampu membuat dan menelurkan rencana yang bagus-bagus untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Namun menurutnya hal itu terkadang tidak disertai dengan kemampuan untuk mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Untuk itu wakil bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan bagi perjuangan para petani IPPHTI yang dinilainya dapat mewujudkan gagasan tentang kemandirian petani melalui kerja yang nyata dan perjuangan mereka selama ini. Beliau berujar dalam kesempatan seminar sebagai berikut:

“...saya kira bapak ibu sekalian pakar pasti ngerti kita ini kadang-kadang pada persoalan strategi buat gagasan bagus, tetapi pada tataran aplikasi penerapan gagasan perlu ditanyakan atau masih harus ditingkatkan. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada bapak ibu sekalian terutama yang tergabung dalam IPPHTI Indramayu, oleh karena itu kehidupan sama kita bagaimana caranya sehingga kemandirian yang dikemukakan dalam visi misi Kabupaten Indramayu juga pada saat pelaksanaannya dapat berjalan...”

Dukungan pemerintah pada aktivitas dan kreativitas petani IPPHTI lebih diperkuat lagi dengan pernyataan yang diberikan oleh wakil bupati dalam acara seminar di Universitas Wiralodra ini. Menurutnya kreativitas petani harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten yang memiliki kewenangan dan otoritas. Dukungan atas aktivitas dan kreativitas petani itu disampaikan secara eksplisit oleh wakil bupati Indramayu tersebut dalam sambutannya:

“Saya sampaikan koordinator IPPHTI bahwa petani itu tidak perlu dikasihani petani hanya ingin eksis dan memberi manfaat, ada yang memfasilitasi yang pada kesempatan yang berbahagia ini disaksikan semua orang ya mangga... Dinas pertanian harus memfasilitasi sehingga apa kemampuan petani antara yang

disampaikan nara sumber memang sudah dimunculkan oleh orang lain, tetapi dibiarkan oleh kita yang memiliki ide/gagasan...”

Selanjutnya keseriusan pemerintah untuk menindaklanjuti harapan petani dalam meminta dukungan pemerintah atas aktivitas mereka dinyatakan oleh wakil bupati dalam pernyataan sebagai berikut:

“...bapak ibu sekalian, selama seminar mudah-mudahan membuahkan beberapa butiran-butiran apa kesepakatan yang nanti dapat ditindaklanjuti dalam langkah yang konkrit dan operasional di Kabupaten Indramayu...”

Kehadiran wakil bupati dalam seminar ini diakhiri dengan kunjungannya pada pameran yang telah digelar di area seputar tempat diselenggarakannya seminar yaitu di sisi aula bagian belakang. Pameran terdiri dari berbagai jenis produk pertanian hasil kreativitas dari petani-petani yang tergabung dalam jejaring IPPHTI Kabupaten Indramayu, seperti misalnya berbagai varietas benih padi dan sayuran hasil persilangan petani, ‘obat-obatan’ alami dan pupuk organik buatan petani, serta peralatan yang digunakan untuk membuat campuran bahan-bahan pestisida nabati hasil kreasi petani sendiri seperti yang ditunjukkan oleh petani dari Desa Sukadana. Wakil bupati dengan antusias meninjau hasil kreativitas petani sambil mendengarkan keterangan yang diberikan petani (lihat gambar 09). Dalam gambar tersebut terlihat salah seorang petani IPPHTI Kabupaten Indramayu, pak Warsiah, sedang menjelaskan benih-benih hasil persilangan didengarkan oleh Wakil Bupati disaksikan Kepala Dinas Pertanian dan peternakan dan lain-lain.



Gambar 09. Bupati Indramayu dalam lokakarya di Universitas Wiralodra. Pemerintah memberikan jaminan dukungan atas aktivitas dan kreativitas petani.

Petani IPPHTI Kabupaten Indramayu telah membuktikan bahwa dengan kehendak yang kuat dan strategi yang dijalankan mereka mampu menggugah perhatian pemerintah untuk memberikan dukungan pada aktivitas dan kreativitas mereka yang selama ini jauh dari perhatian pemerintah. Menurut saya ini merupakan prestasi bagi petani dan suatu pencapaian yang membanggakan.

Hasil dan Implikasi Program *Bisa Dèwèk*: Dukungan Pemerintah dan Kemandirian Petani?

Sub bab ini menjelaskan hasil-hasil yang telah dicapai oleh petani IPPHTI sebagai dampak dari pelaksanaan program *Bisa Dèwèk*. Hasil-hasil yang telah dicapai oleh petani pemulia tanaman dalam usaha yang telah mereka lakukan selama ini membawa implikasi pada posisi dan peran mereka. Adanya dukungan pemerintah dengan disepakatinya dukungan dana untuk melakukan Sekolah Lapang Pemuliaan Tanaman (SLPT) di enam kecamatan yang baru memperlihatkan itu semua. Pernyataan dukungan pemerintah atas kegiatan SLPT telah dilakukan setelah seminar wiralodra dilangsungkan yaitu di akhir tahun 2007. Namun dari

segi waktu, pelaksanaannya baru dapat terealisasi pada awal tahun 2008. pelaksanaan program ini memperlihatkan bahwa petani bukan lagi menjadi objek penerima program semata, namun telah mampu merencanakan dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program yang ditujukan untuk petani. Pengaruh kuat terhadap nilai kemandirian petani terlihat dari sikap mereka dalam Musyawarah Nasional (Munas) IPPHTI Nasional III di Kabupaten Garut. Perwakilan petani-petani IPPHTI Indramayu dalam Munas di Garut merepresentasikan nilai-nilai kemandirian (*Bisa Dèwèk*) dengan menolak usaha-usaha sebagian kalangan (petani IPPHTI Kabupaten lain) untuk menjadikan IPPHTI sebagai organisasi yang bersifat struktural. Petani-petani Indramayu khawatir jika IPPHTI dijadikan organisasi dengan sistem kepengurusan struktural dengan kewenangan terpusat, kebebasan para petani untuk berkreasi dan kemandirian IPPHTI di tingkat kabupaten akan terbatas. Kekhawatiran ini juga terkait dengan kemungkinan yang terbuka bagi pihak-pihak berkuasa untuk menjadikan IPPHTI sebagai kendaraan politik atau sarana untuk memobilisasi massa untuk kepentingan partai misalnya, jika kepengurusan IPPHTI bersifat struktural. Implikasi lain dari program *Bisa Dèwèk* terhadap posisi petani dapat terlihat dari proses dan penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten (Muskab) IPPHTI Kabupten Indramayu ke-3 yang memperlihatkan betapa petani sebenarnya mampu menjalankan pengorganisasian kelompok mereka secara mandiri.

Hasil dan implikasi program *Bisa Dèwèk* penting untuk saya utarakan di sini dengan maksud agar proses yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun ini dapat terlihat dampak atau impliksinya terhadap representasi sikap kemandirian petani. Selain itu dampak yang lebih konkret tentang adanya pengakuan dan dukungan pemerintah atas aktivitas dan kreativitas petani juga saya uraikan. Uraian akan saya awali dengan representasi kemandirian petani yang tercermin dalam sikap dan nilai-nilai *Bisa Dèwèk* dalam Munas IPPHTI Nasional ke-3 di Garut. Uraian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-3 IPPHTI Indramayu yang memperlihatkan kemandirian petani dalam berorganisasi serta menunjukkan proses penguatan IPPHTI Kabupaten Indramayu. Uraian diakhiri oleh pelaksanaan SLPT (Sekolah Lapang Pemuliaan Tanaman) yang dilaksanakan IPPHTI Indramayu atas dukungan

pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Realisasi pelaksanaan program ini baru dapat terwujud sekitar bulan April 2008 yang diawali oleh Training of Trainers (TOT) SLPT untuk menyiapkan tenaga pelatih dari kalangan petani.

Musyawarah Nasional III IPPHTI di Garut: Catatan tentang Refleksi Identitas dan Nilai Kemandirian Petani

Musyawarah Nasional IPPHTI ke-3 diselenggarakan di Garut dan berlangsung dari tanggal 19 sampai 23 November 2007. Kegiatan ini menjadi ajang penegasan petani-petani IPPHTI Indramayu tentang sikap kemandirian mereka sebagai petani yang tunjukkan dari awal hingga berakhirnya penyelenggaraan Munas itu. Hal itu mencerminkan sikap yang merefleksikan nilai-nilai *Bisa Dèwèk* yang telah terbangun selama proses yang telah mereka lalui dalam program *Bisa Dèwèk*. Sikap mandiri dan identitas yang kuat sebagai petani IPPHTI inilah yang mereka bawa ketika mereka berangkat ke Garut untuk menghadiri acara Munas IPPHTI ke-3 yang dihadiri oleh perwakilan petani-petani IPPHTI seluruh Indonesia. Jumlah petani yang hadir dalam acara ini mencapai lebih dari tiga ratus petani.

Waktu pelaksanaan kegiatan Munas itu berselang dua bulan saja semenjak pelaksanaan seminar di Universitas Wiralodra tanggal 30 Agustus 2007. Dalam bab-bab sebelumnya telah diuraikan mengenai terbangunnya penguatan jatidiri sebagai petani IPPHTI yang mandiri, memiliki kepercayaan diri untuk berhadapan dengan pemerintah yang terbangun selama program *Bisa Dèwèk* berlangsung. Nilai-nilai itulah yang mereka tunjukkan pada petani-petani lain yang hadir dalam Munas Garut.

Nilai-nilai kemandirian yang dibawa oleh 'kontingen Indramayu' dalam Munas IPPHTI di Garut tercermin dari pernyataan H. Masroni, sebagai ketua rombongan IPPHTI Indramayu dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi dalam forum pengambilan keputusan terkait kebijakan mengenai struktur organisasi IPPHTI Nasional. Selama ini, IPPHTI merupakan wadah berupa jejaring organisasi yang beranggotakan IPPHTI di tiap-tiap kabupaten yang berdiri sendiri secara independen. Ada keinginan dari beberapa daerah untuk menjadikan IPPHTI sebagai sebuah organisasi struktural dengan kepemimpinan IPPHTI Nasional yang bersifat terpusat. Hal itulah yang ditolak oleh kontingen

Indramayu yang beranggapan bahwa perubahan struktur organisasi itu akan membatasi ruang gerak IPPHTI di tingkatan kabupaten, padahal IPPHTI merupakan organisasi yang mengedepankan sikap kemandirian seperti dikemukakan oleh H. Masroni:

“Kita berangkat dari Indramayu dengan semangat awal tentang kemandirian petani dan tidak menonjolkan komersialisme. Kalo ternyata sampe di sini (Garut) tidak sama atau sejalan dengan yang lain, kita siap mundur.”

IPPHTI Indramayu secara tegas menolak perubahan bentuk organisasi menjadi struktural karena dikhawatirkan akan turut pula merubah nilai-nilai yang ada di dalamnya, misalnya nilai kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Dengan melakukan perubahan bentuk kepengurusan IPPHTI dari bentuk kepengurusan fungsional (jejaring) menjadi bentuk struktural yang dipimpin oleh seorang ketua umum, akan terjadi pengerdilan organisasi dan pembatasan kreativitas. Level kreativitas dan kegiatan di tingkat kabupaten dan daerah berbeda-beda sehingga tidak bisa disejajarkan dalam satu program kerja yang bersifat terpusat di bawah koordinasi IPPHTI Nasional. Penolakan ini kembali dipertegas oleh petani-petani IPPHTI anggota kontingen Indramayu. Dalam satu kesempatan di luar aula, ketika acara pembahasan tentang rencana perubahan AD/ART sedang dihentikan sejenak, H. Masroni mengemukakan keberatannya atas rencana dan isu yang dimunculkan oleh sebagian kalangan petani IPPHTI kabupaten lain untuk menjadikan struktur kepengurusan IPPHTI menjadi bersifat struktural. Dalam obrolan santai sembari menikmati makan siang bersama beberapa petani dari kabupaten lain itu (termasuk juga hadir bu Parjiem dari Gunung Kidul), H. Masroni menyatakan sikap tegasnya menolak rencana tersebut yang menurutnya akan mengurangi unsur kemandirian yang selama ini ada. Dia menegaskan:

“Kita mundur kalo struktural. Selama ini kita sudah mandiri menentukan kegiatan kita sendiri. Kalo struktural kita jadi objek lagi, nunggu instruksi dari atasan. Ada ketua, kepala divisi, pimpro, dll.”

Ditambahkannya lagi bahwa dengan berubahnya struktur kepengurusan dari yang semula bersifat jejaring (fungsional) menjadi kepengurusan dengan yang bersifat struktural (terpusat) akan membuat wewenang IPPHTI di tingkat kabupaten menjadi terbatas dan berpotensi untuk dibatasi. Dengan struktur kepengurusan terpusat, itu berarti bahwa IPPHTI akan dipimpin oleh seorang ketua umum dengan suatu skema program kerja yang sifatnya juga sentralistik. Ini menurut H. Masroni (masih dalam kesempatan makan siang di luar aula saat sidang pembahasan AD/ART rehat) berpotensi menghalangi kebebasan tiap-tiap IPPHTI di daerah (kabupaten) untuk menjalankan programnya sendiri atau untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain. H. Masroni mengatakan: “Nanti kalo ada kerja sama dengan pihak lain ditingkat kabupaten gimana? Bisa saja dilarang oleh pusat”.

Keberatan dan pendapat serupa juga datang dari kontingen Karawang yang berpendapat bahwa secara historis IPPHTI lahir dari kelompok-kelompok kecil yang tergabung dalam paguyuban-paguyuban yang pada tahun 1999 membentuk organisasi. Jadi, dari awal prinsip IPPHTI adalah nilai kebersamaan. Petani Karawang tersebut khawatir jika terjadi perubahan struktur akan berakibat munculnya hirarki dan penggolongan antarsesama IPPHTI di seluruh Indonesia. Jadi ada kekhawatiran akan berkembangnya kekuasaan dalam tubuh IPPHTI, padahal dari semula kedudukan semua anggota sejajar. Menurutnya, banyak para ‘senior’ atau yang dulu ikut terlibat dalam perumusan AD/ART IPPHTI telah memikirkan persoalan ini.

Pak Karsinah, petani IPPHTI Kabupaten Indramayu yang dalam Munas ini turut hadir sebagai anggota kontingen Indramayu mengingatkan agar IPPHTI tetap dalam koridor yang benar dan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang selama ini ada dalam IPPHTI, yaitu nilai kemandirian dan kesetaraan. Dia juga menjadi salah seorang petani yang tidak setuju dengan gagasan merubah bentuk IPPHTI menjadi organisasi yang bersifat struktural dengan kepengurusan terpusat. Pak Karsinah berpendapat bahwa bentuk kepengurusan struktural tidak sejalan dengan cita-cita IPPHTI yang mandiri dan berprinsip kesetaraan. Oleh karena itu jika diubah, itu berarti tidak sesuai dengan ‘roh’ IPPHTI. Pak Karsinah menegaskan: “kalo dirubah menjadi struktural, berarti IPPHTI telah dimasuki oleh roh lain.

Padahal di sini rohnya adalah roh IPPHTI.” Pernyataan pak Karsinah di muka forum mendapat sambutan dan tepuk tangan yang riuh dari para peserta Munas yang memenuhi ruang aula tempat diselenggarakannya acara.

Demikianlah tanggapan petani Indramayu terhadap berbagai sikap yang mereka anggap tidak sesuai dengan semangat kemandirian. Identitas yang telah menguat sebagai petani IPPHTI serta kebanggaan sebagai petani mandiri juga tercermin di Munas ini. Pak Karsinah, salah seorang petani IPPHTI Indramayu yang hadir di Garut mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari IPPHTI Indramayu. Ia menunjukkan identitas diri yang kuat sebagai anggota IPPHTI. Dari obrolan yang saya lakukan dengan pak Karsinah selama di Garut saya memperoleh pernyataan beliau bahwa IPPHTI itu berbeda dengan organisasi petani yang lain. Menurutnya, IPPHTI tidak boleh disamakan dengan organisasi petani lainnya semisal KTNA, HKTI, dan lainnya. Pak Karsinah menuturkan tentang ketidaksukaannya atas adanya perwakilan petani IPPHTI dari kabupaten lain yang memakai atribut-atribut organisasi petani selain IPPHTI. Pak Karsinah berkata:

“Saya sakit hati dengan orang-orang (Lampung) yang pake jaket KTNA di Munas IPPHTI, itu tidak mendewasakan organisasi. Tidak ada nilai identitas dan kebanggaan IPPHTI. Saya tersinggung. Padahal saya saja mengundurkan diri dari KTNA dua bulan ini.”

Ekspresi atas rasa kepemilikan terhadap IPPHTI yang begitu dalam dinyatakan oleh pak Karsinah yang mengaku bahwa dia telah sejak dulu ingin menghadiri acara-acara besar IPPHTI. Munas IPPHTI ke-3 di Garut ini merupakan acara besar IPPHTI. Kesempatan dapat mengikuti Munas itu menjadi sesuatu yang disyukuri oleh pak Karsinah. Dalam hal ini dia mengatakan:

“Saya sudah tua, mungkin umur saya tidak panjang lagi, sejak dulu saya memang ingin menghadiri Munas IPPHTI. Saya akan merasa tenang jika saya meninggal setelah menghadiri Munas ini. Sebab mungkin dalam Munas inilah kesempatan terakhir saya hadir dalam acara besar IPPHTI.”

Kesadaran identitas IPPHTI dan rasa memiliki yang begitu tinggi yang ditunjukkan pak Karsinah, salah seorang anggota IPPHTI Kabupaten Indramayu yang sudah ‘sepuh’ ini, tidak muncul dengan sendirinya tanpa sebuah proses yang telah dilaluinya selama menjadi anggota IPPHTI di Indramayu. Kesadaran itu

terbangun secara bertahap dalam proses selama dia menjadi anggota IPPHTI. Itulah kesan yang saya lihat dan saya tangkap selama program *Bisa Dèwèk* berlangsung. Pak Karsinah dulunya merupakan anggota dari KTNA di kecamatan tempatnya tinggal. Akan tetapi menurutnya, dia berkeyakinan kuat bahwa IPPHTI menjadi wadah yang sangat sesuai dengan aspirasinya untuk menjadi petani mandiri. Proses penguatan identitas itu berlangsung selama program *Bisa Dèwèk* berjalan. Munas IPPHTI ke-3 menjadi begitu berarti bagi pak Karsinah. Menurut ini adalah momen tempat dia dapat menunjukkan pada petani-petani lain dari berbagai tempat di Indonesia, bahwa petani mampu mandiri dan dapat sejajar secara berdampingan dengan pemerintah untuk membangun pertanian.

Dalam kesempatan Munas IPPHTI ke-3 di Garut itu petani Indramayu menampilkan pula pameran berupa benih-benih padi persilangan hasil kreativitas petani-petani jejaring IPPHTI Kabupaten Indramayu. Inilah yang menjadi ciri khas kegiatan para petani IPPHTI Indramayu terkait dengan sains petani yang mereka kembangkan. Aktivitas pengembangan benih tanaman mendapat perhatian dari banyak peserta Munas yang mengunjungi lokasi pameran. Dalam gambar terlihat Sekretaris Jendral Departemen Pertanian sedang meninjau pameran benih milik IPPHTI Indramayu.



Gambar 10. Petani Indramayu dalam Munas IPPHTI III di Garut. Tampak pak Warsiah dan pak Ito sedang memberi penjelasan tentang benih padi hasil persilangan petani-petani IPPHTI Kabupaten Indramayu pada Sekjen Departemen Pertanian.

Catatan dari Muskab ke-3 IPPHTI Kab Indramayu: IPPHTI yang Menguat?

Musyawarah Kabupaten (Muskab) IPPHTI Indramayu yang ke-3 menjadi penunjuk tentang adanya kemandirian petani dalam mengorganisasi diri mereka secara mandiri. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 2008 di Desa Sukadana dan menjadi titik tolak dari 'konsolidasi ke dalam' dari IPPHTI. Di sinilah penguatan identitas kelompok-kelompok pemulia tanaman dari sebelas kecamatan yang menjadi sasaran dari program *Bisa Dèwèk* selama hampir dalam kurun waktu satu setengah tahun, dikukuhkan. Di sinilah juga dampak dari pelaksanaan program *Bisa Dèwèk* terlihat menunjukkan pengaruh terhadap agen-agen yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Musyawarah Kabupaten IPPHTI yang ke-3 ini dilaksanakan sehubungan dengan berakhirnya kepengurusan organisasi yang lama (periode 2005-2008). Berbekal pengalaman mengikuti Musyawarah Nasional yang dilakukan di Garut, pengurus IPPHTI Kabupaten Indramayu menyusun perencanaan untuk melaksanakan Musyawarah Kabupaten dengan melibatkan seluruh kelompok tani yang terlibat dalam program *Bisa Dèwèk*.

Agenda utama Muskab adalah pemilihan koordinator umum dan pembentukan kepengurusan baru organisasi untuk periode 2008-2011. Selain itu, Muskab juga akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari kepengurusan yang lama dan menyempurnakan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta menyusun program kerja.

Hal menarik dalam penyelenggaraan Muskab ini ialah terlibatnya petani yang aktif dalam kegiatan *Bisa Dèwèk* dalam menyiapkan, mengerjakan, sampai menyelenggarakan acara. Mereka merealisasikan rencana pelaksanaan Muskab yang memang sudah bergulir beberapa waktu sebelumnya ketika program *Bisa Dèwèk* masih berjalan. Bahkan H. Sharma, Koordinator Umum IPPHTI Kabupaten Indramayu periode 2005-2008 pernah mengutarakan kepada saya pada satu kesempatan dalam Lokakarya Awal (program *Bisa Dèwèk*) di Kalensari bahwa dia mengharapkan bahwa Muskab dijadikan agenda selanjutnya setelah program *Bisa Dèwèk* berakhir. Hal ini disebabkan karena masa kepengurusan yang dijalankannya akan segera berakhir.

Peserta Muskab adalah petani-petani dari kelompok basis IPPHTI Kabupaten Indramayu yang masing-masing mengirimkan delegasinya sebanyak lima orang. Kelompok tersebut merupakan kelompok-kelompok yang dalam pelaksanaan program *Bisa Dèwèk* dijadikan sasaran pendiseminasian film *Bisa Dèwèk*. Di sini terlihat adanya kesinambungan antara upaya penguatan identitas kemandirian petani di tingkat kelompok dengan upaya untuk membangun kesadaran tentang IPPHTI sebagai sebuah jaringan bersama yang terdiri dari kelompok-kelompok basis di kecamatan. Muskab menegaskan pada petani-petani peserta Muskab bahwa IPPHTI merupakan wadah yang dijadikan tempat untuk berjuang bersama-sama.

Dalam menyiapkan Muskab, acara di Garut mereka jadikan model untuk membuat acara serupa di dalam forum ini.. Format Muskab dapat dikatakan sebagai replika dari format Munas Garut. Petani IPPHTI Indramayu belajar tentang agenda apa saja yang harus ada dalam kegiatan semacam ini, misalnya pembahasan atau peninjauan kembali ART organisasi, membuat komisi-komisi, mengadakan pleno yang membuat rekomendasi-rekomendasi, sampai dengan teknis pemilihan koordinator umum dan pembentukan pengurus baru.

Dalam proses pemilihan koordinator umum, terjaring dua nama kandidat yaitu H. Masroni dan Tawin. Dalam proses pemilihan yang berlangsung meriah tersebut jumlah suara dimenangkan oleh H. Masroni. H. Masroni pun terpilih sebagai Koordinator Umum IPPHTI Kabupaten Indramayu untuk periode 2008-2013 menggantikan H. Sarma yang masa kepengurusannya telah berakhir. Sesaat setelah terpilih, H. Masroni kemudian membuat daftar calon pengurus organisasi. Usulan nama-nama calon pengurus ini merupakan hak prerogatif dari koordinator umum yang terpilih. Usulan nama-nama tersebut kemudian diajukan pada Badan Musyawarah (Bamus) untuk dimintai persetujuan. Susunan Bamus yang baru juga ditetapkan dalam Muskab itu.

Dalam proses penyusunan nama-nama pengurus yang dilakukan terjadi peristiwa menarik yang berkaitan dengan kewenangan Bamus serta menyangkut penilaian mereka terhadap peran, status, dan posisi petani di jejaring organisasi IPPHTI Kabupaten Indramayu. Ketika daftar nama calon pengurus IPPHTI diajukan oleh H. Masroni sebagai koordinator umum terpilih untuk mendapat

pertimbangan Bamus, Bamus merasa keberatan dengan pencantuman satu nama yang menurut mereka tidak layak. Hal ini disebabkan bahwa menurut penilaian mereka, kandidat pengurus tersebut belum secara resmi menjadi anggota IPPHTI.

Susunan kepengurusan IPPHTI Kabupaten Indramayu periode 2008-2011 hasil pemilihan pada Muskab ke-3 di Desa Sukadana adalah sebagai berikut:

<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Asal Kecamatan</u>
Koordinator Umum	: H. Masroni	(Widasari)
Sekretaris	: Wartono A	(Juntinyuat)
Bendahara	: Muadib MR	(Juntinyuat)
Publikasi dan Media	: Koordinator : Taningsih	(Widasari)
	: Anggota : 1. Ito Sumitro	(Widasari)
	2. Tutinah	(Lelea)
	3. Janurindah	(Lelea)
Seksi-Seksi Organisasi	: Koordinator : Jaryan	(Juntinyuat)
	: Anggota : 1. Ade Susanto	(Bongas)
	2. Sumarno	(Kedokanbunder)
Advokasi	: Koordinator : Abbas	(Sukra)
	: Anggota : 1. Jajuli	(Lelea)
	2. Layus	(Tukdana)
Sains Petani	: Koordinator : Warsiah	(Widasari)
	: Anggota : 1. Nurkilah	(Lelea)
	2. Darmin	(Gabuswetan)
Badan Musyawarah (Bamus) IPPHTI Kabupaten Indramayu	: Koordinator : Taryana	(Sliyeg)
	: Sekretaris : Taryama	(Lelea)
	: Anggota : 1. Tawin	(Patrol)
	2. H. Sarma	(Kandanghaur)
	3. Sumarno	(Tukdana)
	4. Karsinah	(Juntinyuat)

Muskab ini menunjukkan terjadinya konsolidasi kekuatan dan penggabungan petani-petani dari berbagai latar belakang pengetahuan yang mereka miliki. Selama ini IPPHTI identik dengan perkumpulan yang keanggotaannya merupakan alumni dari kegiatan SLPHT yang diselenggarakan oleh pemerintah pada awal tahun 1990-an. Program *Bisa Dèwèk* telah membuat orientasi IPPHTI menjadi wadah para petani yang mempunyai nilai-nilai

kemandirian. Di sinilah kemudian IPPHTI melebarkan sayapnya dengan menjadi wadah yang lebih besar, tidak hanya wadah bagi para alumni PHT.

Sekolah Lapang Pemuliaan Tanaman (SLPT) 2008 dan Pembentukan Bank Benih di Enam Kecamatan: Pemerintah sebagai Mitra Petani.

Pengakuan dan dukungan pemerintah kabupaten atas aktivitas dan kreativitas petani-petani IPPHTI diwujudkan dalam bentuk dukungan pembiayaan terhadap kegiatan Sekolah Lapang Pemuliaan Tanaman (SLPT) tahun 2008 dan pembentukan bank benih untuk kebutuhan petani. Dukungan secara resmi telah didapatkan oleh IPPHTI dalam seminar wiralodra di akhir tahun 2007. Pengajuan penyelenggaraan SLPT oleh petani di penghujung tahun 2007 baru dapat direalisasikan oleh pemerintah mendekati pertengahan tahun 2008 yaitu pada bulan April. Pelaksanaan SLPT tahun 2008 dimulai dengan pelaksanaan TOT (*Training of Trainers*) pada bulan April di Kecamatan Sukra untuk mempersiapkan tenaga pelatih dari kalangan petani.

Sekolah Lapang Pemuliaan Tanaman merupakan sekolah lapang untuk petani yang memperkenalkan teknik pemuliaan tanaman. Ini sesuai dengan tujuan IPPHTI dari semula untuk menyebarkan pengetahuan tentang pemuliaan tanaman kepada kalangan petani secara luas. Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan sekolah lapang pemuliaan tanaman di enam lokasi yaitu di Kecamatan Cantigi, Sukra, Anjatan, Haurgeulis, Sukagemiwang, dan Gadingan (lihat juga peta 04 dalam bab II).

Pada penyelenggaraan Sekolah Lapang Pemuliaan Tanaman Kali ini, petani merupakan pihak yang otonom, sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menyelenggarakan kegiatan. Hal ini terlihat dari kewenangan petani dalam SL untuk menyusun anggaran, menentukan lokasi SL, menyusun kurikulum yang diajarkan dan menjalankan fungsi manajerial. Gejala ini merupakan sesuatu yang masih jarang dijumpai terkait dengan kemandirian dan otonomi petani. Ini memperlihatkan adanya posisi petani yang telah mendapatkan kepercayaan untuk membuat suatu perencanaan program untuk keperluan mereka.

Pada masa lalu pada kegiatan pelatihan SLPT, petani hanya menjadi objek dan sangat bergantung pada penyelenggara program, kini mereka sudah mampu

mengorganisasi sebuah program untuk mereka sendiri. Hal itu ditunjang dengan kemampuan yang terdapat pada individu-individu petani yang sejak lama telah berpengalaman menjadi petani pemandu seperti misalnya pak Warsiah, pak Nurkilah, yang dalam program *Bisa Dèwèk* terlibat sebagai tim inti. Kepemanduan itu dilengkapi dengan kemampuan tentang manajerial untuk menjalankan sebuah program, yang antara lain mereka peroleh selama menjalani program *Bisa Dèwèk*. Selain itu beberapa orang petani memang sudah cukup sering terlibat dalam penyelenggaraan program seperti ARF, Pedigrea, dan lain-lain yang menjadikan mereka memiliki kemampuan untuk mengelola sebuah program.

Selain kegiatan SL di enam kecamatan yang diawali dengan TOT di bulan April di Kecamatan Sukra, dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu juga diwujudkan dalam bentuk pembuatan bank benih. Dukungan dana untuk pembuatan bank benih menjadi satu paket dengan perencanaan kegiatan SLPT. Dalam pembuatan bank benih itu terjadi tawar-menawar antara petani dan pihak pemerintah tentang format pembuatan bank benih. Petani menginginkan adanya bank benih dengan format lahan pertanian yang akan ditanami dengan benih-benih konservasi yang tersebar di berbagai kelompok. Jadi, format bank benih menurut gambaran dan harapan petani adalah semacam konservasi dalam bentuk benih hidup, sedangkan pemerintah menginginkan bentuk bank benih sebagai bangunan tempat disimpannya benih, sehingga terlihat ada bukti fisik dari pelaksanaan program. Bank benih itu kini telah dibangun di halaman rumah pak Ito di Kalensari. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sekalipun petani memiliki kewenangan lebih dalam menjalankan program dibandingkan dengan kondisi terdahulu, namun tetap saja bahwa pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas masih berada dalam posisi yang lebih tinggi. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa dalam program ini dana yang dialokasikan merupakan dana pemerintah dengan pengucuran dana yang tidak sejalan dengan jadwal pelaksanaan pelatihan SLPT. Rencana dan keinginan petani dalam beberapa hal masih terbatas dan posisi mereka yang tetap sub-ordinat.



Gambar 11. Suasana SL Pemuliaan Tanaman (SLPT) yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten dan dirancang serta dipandu oleh petani sendiri.

Terlepas dari kenyataan bahwa petani masih harus berkompromi dengan pemerintah dalam hal menentukan dan memutuskan hal yang ideal bagi petani, sebagai contoh yaitu dalam kasus bank benih dan penjadwalan SLPT yang tidak sejalan dengan pengucuran dana, petani setidaknya telah membuktikan bahwa mereka mampu melakukan sebuah kerja sama dengan pihak pemerintah sebagai mitra mereka. Pelaksanaan SLPT di enam kecamatan ini diikuti secara antusias oleh petani (lihat gambar 11).

-oo0oo-

Perjuangan petani untuk memperoleh pengakuan dan dukungan pemerintah atas kegiatan dan kreativitas pemuliaan tanaman telah menumbuhkan kesadaran di kalangan mereka tentang posisi petani dalam relasi hubungan kekuasaan di dunia pertanian. Sejak Revolusi Hijau, petani selalu menjadi sasaran program. Dengan terlaksananya program kerja sama dengan berbagai pihak, petani memiliki kesempatan melakukan penilaian dan refleksi tentang posisi mereka. Pengalaman melakukan relasi dengan berbagai pihak dengan karakteristik pelaksanaan program yang berbeda-beda telah menciptakan kemampuan bagi para petani untuk

melakukan sebuah penilaian reflektif tentang siapa mereka, apa yang dapat mereka lakukan, apa yang baik bagi mereka hingga akhirnya mereka mampu mempertegas identitas dan jatidiri mereka sebagai petani yang mandiri. Ketika misalnya para petani menyadari posisi mereka sebagai ‘sang kerbau’ yang ternyata sering berada dalam kondisi sub-ordinat dari ‘sang harimau’, timbul keyakinan bahwa mereka mampu untuk menjadi ‘kerbau yang merdeka’ dan tidak melulu *manut* (menurut) pada kehendak ‘harimau’ yang merugikan dalam sebuah program yang dijalankan. Begitu pula halnya saat mereka mendefinisikan dengan cara mereka sendiri tentang karakteristik pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan suatu program, mereka dapat menyebutkan (mengklasifikasikan) siapa itu ‘calo’, siapa itu ‘germo’ dan siapa yang menjadi perantara serta sistem kerja sama seperti apa yang ideal menurut petani. Kemampuan melakukan klasifikasi itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Jenkins (2008) bahwa upaya penting dalam penegasan identitas adalah adanya pengklasifikasian (*classification*). Untuk melakukan klasifikasi tersebut terdapat dua unsur yang menentukan yaitu ‘posisi’ dan ‘kategori’. Peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa petani mampu mempertegas ‘kategori’, yakin sebagai diri mereka serta merefleksikan dirinya dalam menentukan ‘posisi’ di tengah-tengah konstelasi relasi kekuasaan yang berjalan selama berlangsungnya program *Bisa Dewèk*. Identitas dan kesadaran sebagai petani mandiri juga dimanifestasikan dalam sikap ketika mereka berhadapan dengan petani lain seperti misalnya dalam kasus pak Karsinah dalam Munas III IPPHTI di Garut yang memperlihatkan kesadaran tentang identitasnya sebagai petani IPPHTI dan petani mandiri (*Bisa Dewèk*).